



Media Pemersatu Bangsa

RENJA

RENCANA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

2021

KATA PENGANTAR



Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) 2021 telah selesai disusun, sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan LPP TVRI dalam melaksanakan penyiaran publik di tahun anggaran 2021. Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) LPP TVRI Tahun 2020-2024 dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

LPP TVRI ke depan didorong dapat mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam rangka memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, sehingga dimensi pemerataan dan kewilayahan dapat ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur khususnya infrastruktur penyiaran televisi melalui transformasi digital. Selanjutnya transformasi digital dapat memaksimalkan peran LPP TVRI dalam menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan sehingga diharapkan LPP TVRI dapat lebih berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang adil, makmur sejahtera.

Selanjutnya guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditargetkan mencapai 5,0 - 5,2% sesuai dengan Tema RKP 2021 **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**, maka pemerataan pembangunan di seluruh pelosok nusantara, prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2021 tetap diarahkan untuk tercapainya konektivitas nasional melalui penyiaran televisi dengan beberapa sasaran kegiatan sesuai kewenangan LPP TVRI antara lain: peningkatan kualitas content program dan berita, memperluas jaringan penyiaran berbasis digital serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia LPP TVRI.

Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 agar dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran LPP TVRI baik di stasiun Pusat maupun daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan LPP TVRI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan infrastruktur penyiaran televisi yang terpadu, terintegrasi dan akuntabel. Akhir kata, Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi

seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik melalui media televisi yang handal dan berkualitas dalam melayani masyarakat.

Jakarta, 30 Desember 2020

Direktur Utama LPP TVRI



Iman Brotoseno p. r. p.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	1
BAB II.....	6
2.1 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	6
2.2 SASARAN LPP TVRI TAHUN 2020-2024.....	7
2.3 TARGET LPP TVRI 2020-2024	8
2.4 SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN LPP TVRI 2021	11
BAB III	13
3.1. PERMASALAHAN.....	13
3.2. TANTANGAN	19
BAB IV	19
4.1 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS LPP TVRI TAHUN 2021.....	19
4.1.1. Direktorat Program dan Berita.....	20
4.1.2. Direktorat Teknik	23
4.1.2.1. Rencana Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama Teknik	23
4.1.2.2. Rencana Kerja Bidang Teknik Produksi dan Penyiaran	25
4.1.2.3. Rencana Kerja Bidang Transmisi	26
4.1.3. Direktorat Pengembangan Usaha.....	27
4.1.4. Direktorat Umum.....	28
4.1.4.1. Penguatan Kelembagaan	28
4.1.4.2. Pembinaan dan Peningkatan Tata Kelola Bidang Sumber Daya Manusia	30
4.1.4.3. Penguatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).....	32
4.1.4.4. Pelayanan Sarana dan Prasarana.....	33
4.1.5. Direktorat Keuangan	33
4.1.5.1 Rencana Kerja Koordinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja.....	33
4.1.5.2 Rencana Kerja Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35
4.1.5.3 Rencana Kerja Koordinator Akuntansi, Manajemen Resiko, dan Perpajakan.....	39
4.1.6. Pusdiklat	41
4.1.7. Puslitbang	41
4.1.7.1. Bidang Pengkajian Program dan Berita	42
4.1.7.2. Bidang Pengkajian Pengembangan Usaha	42
4.1.7.3. Bidang Pengkajian Kelembagaan.....	43

4.1.7.4. Bidang Pengkajian Teknologi.....	43
4.1.8. SPI.....	44
4.1.8.1. Supervisi dan Koordinasi.....	44
4.1.8.2. Pelaksanaan Audit.....	44
4.1.8.3. Tindak Lanjut Hasil LHP.....	45
4.1.8.4. Reviu Perencanaan Penganggaran.....	45
4.1.8.5. Kapabilitas APIP.....	46
4.1.8.6. Peningkatan Kualitas SDM.....	47
BAB V.....	49
LAMPIRAN 1.....	50
LAMPIRAN 2.....	53
LAMPIRAN 3.....	58
LAMPIRAN 4.....	64
LAMPIRAN 5.....	75
LAMPIRAN 6.....	83
LAMPIRAN 7.....	91
LAMPIRAN 8.....	100
LAMPIRAN 9.....	106
LAMPIRAN 10.....	111

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Prioritas nasional Tahun 2021
- Gambar 1.2 : 6 (enam) Pengarustamaan (*Mainstreaming*) RPJMN 2020-2024
- Gambar 1.3 : 6 (enam) Pengarustamaan (*Mainstreaming*) RPJMN 2020-2024
- Gambar 2.1 : Sasaran nasional dan Indikator RPJMN Tahun 2020-2024
- Gambar 2.2 : Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Berkewilayahan 2020-2024

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Target LPP TVRI Tahun 2020-2024
Tabel 4.4	: Total Alokasi Pagu Alokasi Anggaran LPP TVRI Pusat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir 1 : K/L Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 2 : Formulir 2 : Program K/L Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 3 : Formulir 3 :Kegiatan Teknik Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 4 : Formulir 3 : Kegiatan Program Dan Berita Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 5 : Formulir 3 :Kegiatan Pengembangan Usaha Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 6 : Formulir 3 :Kegiatan Keuangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 7 : Formulir 3 : Kegiatan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 8 : Formulir 3 :Kegiatan Satuan Pengawas Internal Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 9 : Formulir 3 : Kegiatan Pusdiklat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 10 : Formulir 3 :Kegiatan Puslitbang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2021



BAB I PENDAHULUAN

Memasuki pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode Tahun 2020-2024, penyelesaian pembangunan infrastruktur salah satu fokus prioritas pemerintah Presiden & Wakil Presiden Jokowi-Amin Ma'ruf. RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi dokumen perencanaan nasional yang dipergunakan sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah, yang selanjutnya dijabarkan secara tahunan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja LPP TVRI merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang memuat sasaran strategis, sasaran kegiatan prioritas, sasaran program atau kegiatan, indikator kinerja utama (IKU) dan target pembangunan yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran berjalan, dimana selanjutnya akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kinerja LPP TVRI.

Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 disusun mengacu kepada agenda kerja masing-masing unit kerja di lingkungan LPP TVRI yang perlu diselesaikan pada tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Program dan Kegiatan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sehingga RKP 2021 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya pendanaan untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sebagai RKP kedua dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2021 memiliki empat fokus

1. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi.
2. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional.
3. Ketiga, reformasi sistem jaring pengaman sosial.
4. Keempat, reformasi sistem ketahanan bencana.

RKP 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain

1. penguatan ketahanan ekonomi,

2. pengembangan wilayah,
3. peningkatan SDM,
4. peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. penguatan infrastruktur,
6. pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta
7. stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun 7 prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagaimana gambar dibawah ini



Gambar 1.1, Prioritas Nasional Tahun 2021

Dari tujuh agenda tersebut diatas, peran LPP TVRI dapat memberikan kontribusi bagi 7 agenda pembangunan RPJMN ke IV tahun 2020-2024 karena peran LPP TVRI sebagai lembaga yang dapat menyiarkan informasi secara nyata kepada publik seluruh Indonesia maupun dunia atas proses dan keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional sesuai visi dan misi RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga

keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi. *Mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender
2. Tata kelola pemerintah yang baik
3. Pembangunan berkelanjutan
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
5. Modal sosial dan budaya
6. Transformasi digital

Adapun penjelasan masing-masing dari 6 (enam) *mainstreaming* tersebut adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini

Gambar 1.2, 6 (enam) Pengarustamaan (*Mainstreaming*) RPJMN 2020-2024



Sumber RPJMN 2020-2024

Gambar 1.3, 6 (enam) Pengarustamaan (*Mainstreaming*) RPJMN 2020-2024



Sumber RPJMN 2020-2024

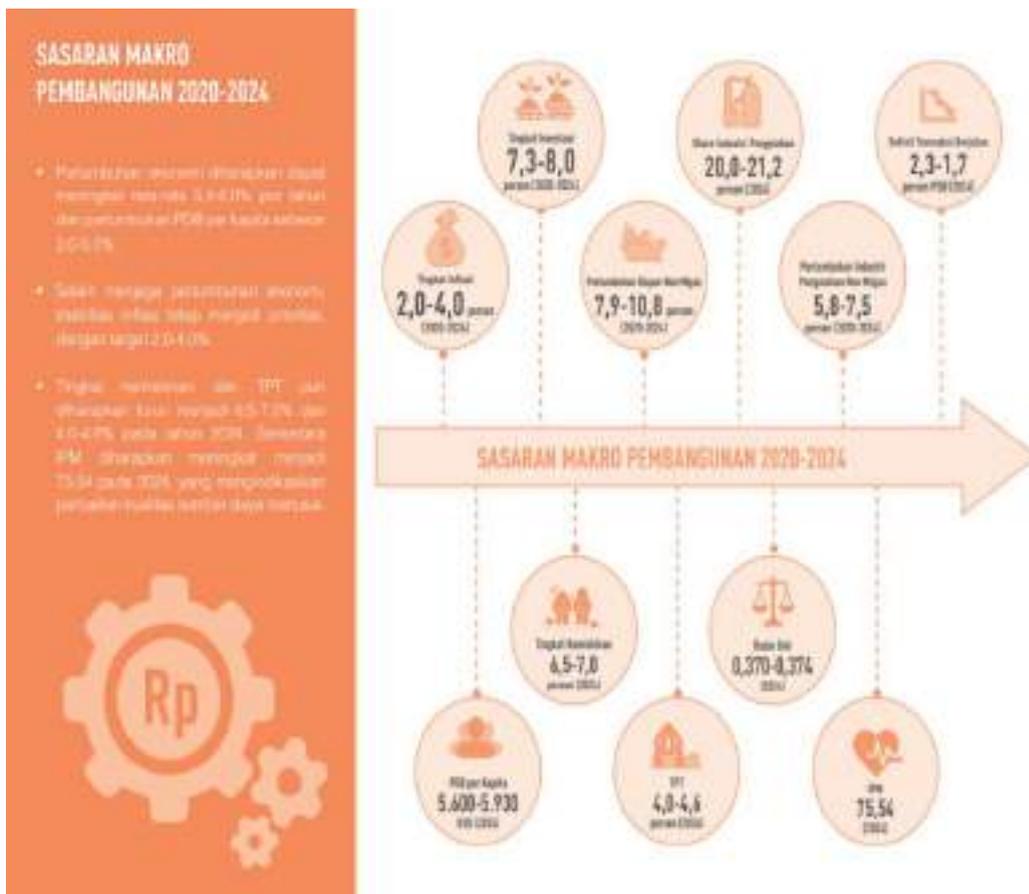
Khusus untuk Butir 6 (enam) *mainstreaming* transformasi digital merupakan fokus yang menjadi sebagian tanggungjawab TVRI sebagai Lembaga Penyiaran TV publik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya transformasi digital akan mempengaruhi perubahan teknologi yang dimiliki oleh LPP TVRI yang sebagian masih menggunakan teknologi analog sehingga LPP TVRI harus dapat menjawab tantangan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.



2.1 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden maka visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional beserta indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Gambar 2.1 Sasaran nasional dan Indikator RPJMN Tahun 2020-2024



Untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional nasional dan indikatornya maka pada tahun 2020-2024 akan dilaksanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan berkewilayahan periode 2020-2024 sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 2.2.

Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Berkewilayahan 2020-2024



2.2 SASARAN LPP TVRI TAHUN 2020-2024

Dalam kerangka pembangunan transformasi digital, diharapkan LPP TVRI dapat membangun infrastruktur penyiaran diseluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan, wilayah terluar dan tertinggal (3T). Untuk itu, pembangunan transformasi digital akan dapat memberikan peningkatan pelayanan siaran TV public yang modern sehingga LPP TVRI dapat memiliki kemampuan penyediaan yaitu *Big Data*, *Artificial Intelligence*, literasi masyarakat, keamanan *cyber*, pengembangan SDM teknologi informasi, pengembangan industri teknologi informasi serta *research and development* yang kuat. Dengan demikian salah satu tugas dan fungsi LPP TVRI dalam kerangka pembangunan prioritas nasional adalah pengembangan infrastruktur penyiaran dan transformasi digital.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut khususnya dalam pembangunan transformasi digital sesuai dengan RJPMN 2020-2024, maka Tujuan dan Sasaran Strategis LPP TVRI adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas konten (yang meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik
2. Belum efektif dan efisien kelembagaan TVRI

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan organisasi LPP TVRI periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan siaran TV publik yang modern

Tujuan strategis tersebut merupakan outcome LPP TVRI dalam jangka waktu 5 tahun atau dalam jangka waktu menengah sebagai upaya terjadinya migrasi Infrastruktur dalam rangka peningkatan peralatan produksi dan penyiaran yang berbasis Teknologi digital sehingga dapat mewujudkan Penyiaran TV Publik sebagai sarana penyebaran informasi tentang pariwisata, kesehatan, industri dalam rangka pemulihan ekonomi. Tujuan strategis tersebut perlu dijabarkan kedalam sasaran strategis dengan capaian jangka waktu yang lebih pendek yaitu capaian per tahun. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam mewujudkan tujuan organisasi LPP TVRI adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas konten (yang meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik
2. Meningkatnya kualitas internal kelembagaan TVRI

2.3 TARGET LPP TVRI 2020-2024

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan penyiaran publik televisi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran LPP TVRI. Pengukuran kinerja LPP TVRI merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan indikator kinerja utama LPP TVRI sesuai dengan Peraturan Direksi LPP TVRI Nomor ... Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan LPP TVRI. Indikator Kinerja Utama (IKU) LPP TVRI tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) aspek utama, yaitu : (1)



kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik (2) kualitas Internal kelembagaan 3) Kapasitas transportasi. Tiap IKU memiliki target, sebagai berikut Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Target LPP TVRI Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik	1. Audience share/rating	1.62	1.7	2	2.2	2.4	2.5
	2. Public Values	0	3	3,1	3,2	3,4	3,5
	3. Public Participation	0,3%	0,6%	1,2%	1,8%	2,4%	3,0%
	4. Populasi yang terlayani penyiaran digital	52%	53%	60%	70%	75%	80%
	5. Share Nilai Marketing terhadap Pendapatan	5.3%	5.6%	11.7%	7.7%	6.4%	5.9%
Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2. Indeks RB	49,83	60	70	80	100	100
	3. Indeks Layanan Publik	8.52	8.60	8.70	8.80	9.0	9.2
	4. Nilai SAKIP	50.13	60	70	80	100	100
	5. Zona Integritas	0 Unit kerja	3 Unit kerja	7 Unit kerja	10 Unit kerja	10 Unit kerja	5 Unit kerja
	6. Jumlah Peningkatan PNBPN	131,567 M	132,2 M	292,8 M	537 M	789,60 M	1030,3 M

Sumber : Renstra LPP TVRI 2020-2024

Sebagaimana tabel Indikator kinerja utama diatas pada Sasaran Strategis utama, yaitu “Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik” sesuai dengan amanat RPJMN target yang akan dicapai dalam matriks kinerja tersebut adalah:

1. Siaran pendidikan dan budaya pada Kegiatan Program dan berita, ditargetkan sebesar 2.920 jam siar pada tahun 2024
2. Siaran pendidikan dan agama, ditargetkan sebesar 1.600 jam siar pada tahun 2024
3. Migrasi infrastruktur, peralatan produksi dan siaran yang berbasis teknologi digital, dengan target 44 lokasi pada tahun 2021
4. Populasi yang terlayani penyiaran digital ditargetkan 80% pada tahun 2024

Untuk itu, pencapaian indikator sasaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan diatas, diharapkan LPP TVRI semakin diterima oleh masyarakat, sehingga program dan konten yang disampaikan semakin banyak diterima oleh masyarakat.

2.4 SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN LPP TVRI 2021

Sesuai dengan sasaran strategis pembangunan dalam Rencana Strategis LPP TVRI 2020-2024 yang dijabarkan dalam 2 aspek yaitu (i) Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik, (ii) Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan sesuai tugas dan tupoksi LPP TVRI untuk mewujudkan penyiaran publik yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

A. Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik

Sasaran aspek peningkatan kualitas konten penyiaran TV Publik, meliputi

1. Meningkatnya kualitas siaran program dan berita, dengan menetapkan target pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Persentase Jumlah Jam Siaran pendidikan dan budaya
 - Persentase Jumlah Jam Siaran pendidikan dan agama
 - Persentase Jumlah Jam Siaran Lainnya
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur penyiaran berbasis Digital dengan menetapkan target pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Persentase jumlah Migrasi peralatan produksi dan siaran dari analog ke teknologi berbasis Digital
3. Meningkatnya Kualitas pengembangan dan usaha dengan menetapkan target pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Persentase jumlah Kerjasama Kemitraan
 - Persentase Jumlah Target PNBPN [meningkat 20% dari tahun 2020 atau sebesar Rp153.054.000.000,00]

B. Meningkatnya kualitas Internal kelembagaan sesuai tugas dan tupoksi LPP TVRI

Sasaran aspek kualitas internal kelembagaan LPP TVRI, meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan sesuai standar, dengan menetapkan target pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Persentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan kinerja yang dihasilkan
 - Persentase kualitas keuangan sesuai standar
 - Persentase jumlah pengelolaan PNBPN

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi, kelembagaan, SDM, BMN dan Sarana Prasarana dengan menetapkan target pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Persentase Pengelolaan BMN sesuai standar
 - Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi
 - Tingkat kepuasan layanan
3. Meningkatnya kualitas Pengawasan Interna dengan menetapkan target pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Persentase tingkat pengawasan sesuai standar
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
 - Indeks profesionalisme pegawai
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
 - Jumlah persentase kajian layanan publik



BAB III

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM BIDANG PENYIARAN PUBLIK

3.1. PERMASALAHAN

1. Belum optimalnya layanan Program dan Berita yang disebabkan
 - a. Kreatifitas konten program dan berita masih perlu ditingkatkan. Hal ini untuk dapat meningkatkan kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat sehingga kualitas program dan berita akan semakin baik dan dapat bersaing dengan televisi-televisi swasta yang ada.
 - b. Kecepatan penyampaian informasi strategis yang masih belum optimal. Penyampaian informasi strategis, seperti penanganan kebencanaan harus dapat disiarkan TVRI secara cepat karena hal ini merupakan berita yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mendapat kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat.
 - c. Sistem produksi dan siaran nasional dengan lokal yang sebagian masih belum terintegrasi. Untuk dapat memberikan informasi yang utuh dan lengkap diperlukan integrasi antara siaran nasional dengan lokal sehingga menu-menu pada program berita baik di nasional dan lokal bisa dapat saling mengisi dan memperkaya konten siaran.
 - d. Publikasi Indonesia masih belum berskala global. TVRI dalam mendukung tujuan pembangunan nasional perlu didorong untuk mempublikasikan siaran-siaran Indonesia berskala global agar dapat memberikan informasi yang luas bagi dunia yang diharapkan masyarakat dunia dapat mengetahui secara lebih dalam tentang Indonesia sehingga diharapkan dapat berimplikasi terhadap sektor-sektor pembangunan seperti pariwisata dalam mengenalkan adat dan budaya bangsa.
2. Belum optimalnya layanan teknik dalam mendukung produksi dan siaran televisi yang disebabkan
 - a. Daya jangkau siaran yang masih terbatas (*coverage area* dan *coverage population*) yang saat ini *coverage area* baru mencapai 52% dan *coverage population* mencapai 63% dikarenakan peralatan sudah berusia lebih dari 35 tahun. Saat ini TVRI baru memiliki 121 pemancar digital sementara menurut Permenkominfo No 6 Tahun 2019 TVRI menjadi penyelenggara *multiplexing* di 225 wilayah layanan (diseluruh *coverage population*). Menurunnya *coverage population* dan *coverage area* disebabkan Ijin Siaran Radio (ISR) untuk pemancar VHF sudah tidak diterbitkan sehingga pemancar TVRI VHF sudah tidak beroperasi.
 - b. Pada Industri penyiaran televisi saat ini telah menggunakan teknologi digital dengan format HD bahkan 4K, sementara saat ini TVRI Stasiun Daerah masih ada

yang menggunakan peralatan analog dan dari 30 Stasiun penyiaran TVRI daerah hanya 6 Stasiun yang menggunakan Digital kamera sistem itupun masih berformat SD (Standar Definition)

- c. Ketersediaan tenaga teknis masih belum memadai. Pegawai TVRI memiliki tenaga yang berpendidikan S1 sebanyak 95 Orang, S2 sebanyak 12 Orang . Hal ini menunjukkan kebutuhan SDM yang berkompeten masih relatif kurang sehingga diharapkan kedepan adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan baik dalam jalur *degree* maupun *non degree* program.
 - d. Saat ini sudah tersedia layanan multiplatform service dan Data Center yang terintegrasi akan tetapi masih dalam proses pengembangan dari sisi infrastruktur IT.
 - e. TVRI belum masuk dalam saluran siaran dunia dikarenakan TVRI belum dapat kesempatan menyelenggarakan siaran berlicense atau hak siar internasional.
3. Belum efektifnya pelaksanaan Pengembangan Usaha dalam mendukung pemasaran produksi dan fasilitas yang disebabkan oleh:
- a. Regulasi yang ada belum adaptif sesuai kondisi pasar. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 baru ditandatangani Presiden RI tanggal 10 November 2020 dan mulai diberlakukan tanggal 11 Januari 2021. Regulasi yang baru ini belum tersosialisasikan secara optimal di internal, bahkan untuk publik eksternal [para klien dan mitra kerja] dapat dikatakan belum sama sekali. Kementerian, Lembaga, instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah dan sektor swasta masih menggunakan referensi harga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017. Pemberlakuan regulasi pada akhir tahun ini tentu perlu kebijakan transisi agar dapat diterima oleh pasar.
 - b. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] dari usaha jasa siaran dan non siaran belum maksimal dimanfaatkan karena dalam kegiatan Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha TV Publik seluruh potensi penerimaan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif PNBP LPP TVRI. Pada peraturan pemerintah penggantinya optimalisasi pemanfaatan aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga sudah diatur [PNBP fungsional]. Namun untuk PNBP umum, optimalisasi aset mengikuti regulasi yang sudah ada.

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI dalam rangka untuk mewujudkan visi dan sebagai implementasi pelaksanaan misi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang diposisikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Untuk tujuan tersebut LPP TVRI membutuhkan pendanaan yang setiap tahunnya naik minimal 25 persen seiring dengan peningkatan kualitas layanan yang diberikan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi dimaksud. Karena itu pengembangan dan penggalian sumber-sumber PNBP, khususnya yang bersumber dari pemanfaatan aset perlu lebih aktif dan progresif.

- c. Kinerja *rating* dan *share* program kurang kompetitif dalam indikator efektifitas dan efisiensi menurut pengiklan hal ini disebabkan karena pengiklan masih mempercayai *rating* dan *share* yang dikeluarkan oleh Nielsen sebagai ukuran kesuksesan dari kegiatan *branding*, *marketing* dan *selling*. Semakin tinggi *rating* dan *share* sebuah program, semakin banyak pengiklan yang menempatkan iklannya pada program tersebut. Untuk itu *rating* dan *share* dari program acara hendaknya diperlakukan sebagai produk yang perlu ditingkatkan terus performanya sehingga mempunyai daya saing.
- d. Kinerja promosi dan publikasi belum optimal. Sampai saat ini anggaran promosi dan publikasi disusun berdasarkan *affordable method* atau metode sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dampak metode ini mengakibatkan penyusunan anggaran promosi tahunan yang tidak menentu yang pada akhirnya menyulitkan perencanaan komunikasi pasar dalam jangka panjang. Metode ini mengabaikan peran promosi sebagai investasi, penguatan brand dan pengaruh terhadap volume *billing*.

Pada sisi yang lain berdasarkan survey Nielsen keberadaan produk [program] TVRI tidak mem-*positioning*-kan produk atau jasa pengiklan. Selain itu siklus dan kontinuitas program seringkali terlalu cepat dan tidak terpelihara. Kedua kondisi tersebut menjadikan kegiatan promosi dan publikasi kurang powerfull untuk memberikan dampak pada pembangunan brand dan pencapaian *billing*. Karena itu idealnya performa produk dan kontinuitasnya lebih dulu diutamakan, selain ketersediaan anggaran yang memadai berdasarkan perencanaan komunikasi. Idealnya anggaran promosi dan publikasi sekitar 10-20 persen dari total target *billing* PNBP yang ingin dicapai pada tahun anggaran.

- e. Rendahnya kemampuan optimalisasi *asset* dan multi media dalam pemasaran. Hampir semua Stasiun Penyiaran berada di lokasi yang strategis dan memiliki potensi yang sama. Oleh karena itu aset yang dimiliki perlu dioptimalkan dalam rangka diversifikasi penerimaan. Saat ini penerimaan pendapatan dari optimalisasi aset baru mencapai 1,16%, khususnya dari PNBP Fungsional.

Masalah yang dihadapi optimalisasi selama ini selain status aset adalah kemampuan anggaran yang terbatas untuk optimalisasi aset. Sementara itu penawaran kerjasama dari pihak lain cukup menggembirakan. Rata-rata penawaran untuk kerjasama jangka panjang yaitu 5 tahun ke atas. Untuk

kerjasama seperti ini perlu kajian dan perencanaan yang matang serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Dampak lain dari keterbatasan kemampuan anggaran dan sumber daya lainnya adalah pemanfaatan multi media dalam kegiatan pemasaran dan penjualan untuk mengoptimalkan billing PNB. Belum ada bidang khusus yang menangani ini sebagai unit bisnis strategis.

- f. Kemampuan, jumlah dan *networking* Tenaga Penjualan [*Account Executive/AE*] di bidang usaha jasa siaran dan non siaran saat ini masih terbatas sehingga berdampak pada penanganan kerjasama. Kondisi ini bukan hanya di Kantor Pusat tetapi juga di Stasiun Penyiaran. Bahkan untuk Stasiun Penyiaran ada yang tidak mempunyai tenaga AE. Untuk meningkatkan kapasitas [jumlah] dan kapabilitas tenaga AE, Direktorat Pengembangan dan Usaha sudah mengajukan permintaan. Sedangkan untuk meningkatkan kapabilitas AE direncanakan akan diikutsertakan pada berbagai kegiatan *capacity building* dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat TVRI maupun lembaga pendidikan dan pelatihan di luar TVRI.
4. Belum optimalnya layanan dibidang Umum yang disebabkan oleh :
 - a. Kondisi aset saat ini banyak mengalami kerusakan, depresiasi dan termakan usia antara lain Gedung Kantor dari 674 unit terdapat 88 unit rusak berat, Kendaraan roda empat 472 unit terdapat 76 rusak berat, Peralatan Produksi dan Penyiaran dari 10.226 unit terdapat 4.383 rusak berat, dan Peralatan Transmisi dari 361 unit dan 114 unit rusak berat.
 - b. Manajemen SDM TVRI, penataan organisasi, penataan peraturan perundang-perundangan masih belum tertata dengan baik sehingga diperlukan pembenahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini.
 - c. Beban kerja dan jumlah personil masih belum ideal. Berdasarkan analisis beban kerja di masing-masing direktorat kantor pusat dan stasiun televisi penyiaran adalah sebanyak 5.461 orang pegawai. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseragaman dan ketimpangan dalam jumlah beban kerja mengakibatkan terjadinya kekurangan pegawai sekitar 1.003 orang pegawai. Contohnya pegawai di satuan transmisi yang idealnya ditangani oleh 4 orang, saat ini ada 70 transmisi yang hanya ditangani oleh satu orang sehingga beban kerjanya tidak seimbang.
 - d. Belum terimplementasinya sistem manajemen karir secara efektif dalam mendukung pola pengembangan karir seluruh pegawai TVRI sehingga seluruh pegawai diharapkan mendapatkan kejelasan pada pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - e. Belum tertatanya sistem dokumentasi dan kearsipan hal ini disebabkan TVRI belum memiliki sistem kearsipan dan dokumentasi sesuai dengan standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disamping itu juga belum memiliki unit

pengelola kearsipan.

5. Belum optimalnya layanan dibidang Keuangan yang disebabkan oleh
 - a. Kualitas laporan keuangan LPP TVRI yang perlu ditingkatkan
Saat ini laporan keuangan LPP TVRI telah meraih WTP, namun masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi agar laporan keuangan LLP TVRI mendapatkan opini WTP dengan sempurna ada catatan-catatan seperti masih belum tertatanya asset, penyelesaian akun-akun bawaan yang tidak bergerak dalam neraca, akurasi catatan angka laporan keuangan dengan data pendukung dan penyelesaian tindak lanjut BPK.
 - b. Perlunya pemutakhiran standar biaya khusus (mengatur standar honor khusus *news anchor*). Sebagai lembaga yang bergerak dibidang industri kreatif terdapat beberapa kendala terkait dengan kesejahteraan tenaga profesional sehingga diperlukan standarisasi terkait hal tersebut (SBML).
 - c. Sistem Pengelolaan keuangan yang belum tertata dengan baik sehingga timbul keterlambatan pembayaran dikarenakan proses yang terlalu panjang, yang akan berpotensi menghambat realisasi pencairan. Untuk itu, diperlukan sistem dengan berbasis IT dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
 - d. Kualitas kompetensi pengelola keuangan belum maksimal. Terdapat pelayanan yang masih belum informatif untuk menunjang kecepatan pembayaran.
 - e. Sistem aplikasi keuangan belum terintegrasi menyebabkan informasi pembebanan dari masing-masing unit kerja mengalami disinformasi.
 - f. Dokumen penganggaran belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan di mana peran evaluasi dalam memonitoring anggaran belum maksimal sehingga terjadi kesalahan administrasi.
 - g. Masih banyak piutang yang belum diselesaikan karena tidak kooperatifnya pihak ketiga dalam melakukan pembayaran sehingga berdampak pada penerimaan.
 - h. Belum seragamnya struktur penyusunan dalam hal penggunaan akun dan format penyusunan, baik di kantor pusat maupun stasiun daerah.
 - i. Lambatnya pengumpulan dokumen dari direktorat lain untuk memenuhi permintaan dari mitra LPP TVRI (Kemenkeu dan Bappenas)
6. Belum efektifnya pelaksanaan penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan yang disebabkan :
 - a. Hasil litbang belum terpublikasi dalam jurnal dan belum optimal mendorong peningkatan kualitas produksi siaran karena belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi masukan bagi penyempurnaan khususnya dalam program dan berita serta pemanfaatan bagi masyarakat.
7. Belum efektifnya pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang disebabkan :
 - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana diklat
Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan diklat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sesuai dengan arah kebijakan TVRI dalam Renstra 2020-2024 akan mewujudkan TVRI yang modern. Pengertian modern adalah melakukan pembaharuan dari sistem analog ke sistem digital. Untuk itu dalam

rangka pemenuhan penyelenggaraan diklat dibutuhkan peralatan yang memenuhi sistem digital dengan teknologi terkini.

- b. Jumlah Tenaga fungsional diklat belum tersedia
Saat ini tenaga fungsional diklat untuk mendukung penyelenggaraan diklat LPP TVRI belum tersedia. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program pengembangan diklat. Jumlah tenaga fungsional diklat yang diperlukan: 1) Fungsional Widyaiswara, 2) Instruktur Bidang Teknik, 3) Instruktur Bidang Program dan Berita, 4) Instruktur Manajemen dan Organisasi.
- c. Standar kurikulum belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan diklat perlu didukung standar kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga Pusdiklat perlu segera memenuhi kebutuhan kurikulum bagi pengembangan kapasitas SDM. Adapun kurikulum tersebut harus memuat standar broadcasting technology digital, konten kekinian dengan tetap menjaga nilai-nilai kepublikan. Diharapkan penyesuaian standar kurikulum tersebut dapat memenuhi peningkatan kapasitas SDM di TVRI.
- d. Masih rendahnya kualitas manajemen diklat
Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan diklat diperlukan kemampuan dalam manajemen diklat yang meliputi: 1) Penyusunan TNA, 2) Rancang bangun kurikulum dan modul, 3) Standar pelatihan, 4) Standar Bahan Ajar, 5) Standar evaluasi. Untuk itu dalam 5 tahun kedepan seluruh staf dan manajemen pusdiklat diharapkan sudah mendapatkan kemampuan MOT, TOC, dan TOT.
- e. Belum efektifnya pelaksanaan program diklat structural dan fungsional
Sesuai dengan kebijakan nasional bahwa sistem pola karir aparatur pemerintah lebih diarahkan kepada pola karir fungsional. Untuk itu pusdiklat harus dapat bekerjasama dengan bagian SDM Direktorat Umum untuk menetapkan jenis-jenis jabatan karir sebagai carrier path yang menjadi kebutuhan pengisian jabatan karir. Sehingga diharapkan pusdiklat harus segera menyiapkan rencana pengembangan SDM berbasis pola karir fungsional.
- f. Belum tersertifikasinya tenaga profesi
Dalam rangka pengembangan LSP TVRI akan dilakukan penyiapan standar sertifikasi bagi seluruh pegawai sesuai dengan profesi bidang penyiaran televisi yang telah ditetapkan. Saat ini finalisasi penetapan LSP TVRI akan segera diselesaikan. Untuk itu pusdiklat harus menyiapkan seluruh perangkat-perangkat dalam mendukung kegiatan LSP TVRI. Sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama tenaga-tenaga profesi tersebut mendapatkan sertifikasi.
- g. Masih terbatasnya jumlah SDM Pusdiklat
Sesuai dengan peran TVRI dalam 5 tahun kedepan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM LPP TVRI. Sehingga untuk melaksanakan peningkatan kapasitas SDM tersebut, diperlukan pengelolaan dalam pelaksanaan peran pusdiklat. Saat ini jumlah SDM Pusdiklat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan diklat sangat terbatas dengan jumlah 30% dari total yang dibutuhkan.

3.2. TANTANGAN

1. Tersebarunya pemancar sampai ke daerah pelosok serta memiliki 30 stasiun penyiaran daerah dan satu-satunya TV yang bersiaran secara nasional. TVRI memiliki pemancar sampai ke daerah pelosok dan memiliki 30 stasiun penyiaran daerah yang bila dibandingkan dengan televisi lain tidak memiliki pemancar dan stasiun penyiaran yang sama sampai daerah. Hal ini menjadikan kekuatan TVRI dalam memberikan kontribusi siaran berupa informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Memiliki *intangible asset* (arsip audio visual) serta aset strategis. TVRI dibentuk sebelum televisi swasta ada sehingga keberadaan TVRI yang sangat lama dalam penyiaran memiliki *asset intangible* dan sangat strategis untuk menjadi dokumentasi negara yang akan digunakan untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.
3. TVRI sebagai penyelenggara Multipleksing Nasional



BAB IV PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN 2021

4.1 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS LPP TVRI TAHUN 2021

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021 maka LPP TVRI mendukung di 3 Prioritas Nasional yaitu Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing), Prioritas Nasional 4 (Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa), dan Prioritas Nasional 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis LPP TVRI Tahun 2020-2024, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas program kerja pemerintah yang mana penyediaan infrastruktur penyiaran televisi melalui transformasi digital yang memadai akan memberi dampak signifikan bagi pemerataan kesejahteraan antar wilayah pada jangka panjang. Dalam mencapai target pembangunan nasional sampai Tahun 2024, maka LPP TVRI telah memasukkan beberapa kegiatan untuk mendukung penyiaran publik dalam Prioritas Nasional Tahun 2021 diantaranya :

1. Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik TVRI
2. Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik
3. Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik

4. Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI
5. Pengelolaan Keuangan LPP TVRI
6. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik
7. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI
9. Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional

4.1.1. Direktorat Program dan Berita

Dalam mewujudkan Visi dan Misi LPP TVRI periode 2020-2024 maka Direktorat Program dan Berita LPP TVRI sesuai dengan peran dan kewenangan dapat memberikan kontribusi terhadap Visi Misi melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat Program dan Berita, Adapun Tujuan dan sasaran Direktorat Program dan Berita adalah Meningkatnya kualitas konten siaran (meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik.

Program Penyiaran TV Publik di tujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama LPP TVRI yang meliputi tugas penyusunan program dan berita, melaksanakan programming, operasional siaran, akuisisi dan produksi program, melaksanakan penunjang program dan berita, serta melaksanakan Berita, meliputi siaran berita, current affair, siaran olahraga dan produksi berita.

4.1.1.1. Rencana Kerja Bidang berita

Bidang berita sesuai visi lembaga penyiaran publik LPP TVRI menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman maka bidang berita menuangkannya dalam berbagai program informasi. Informasi dituangkan dalam bentuk news buletin, news magazine, talkshow, dan siaran olahraga yang informatif dan mencerdaskan.

News buletin terdiri dari Klik Indonesia Pagi, Klik Indonesia Siang, Klik Indonesia Malam, English News Service, dan Dunia Dalam Berita. Selain itu TVRI juga menyiarkan Informasi Terkini dan Breaking News untuk menyiarkan peristiwa luar biasa yang terjadi. Melalui News buletin TVRI menyampaikan berbagai peristiwa aktual, kebijakan pemerintah termasuk pencapaian pembangunan yang dilaksanakan saat ini. TVRI juga aktif mengambil peran sebagai TV Pool dalam pemberitaan pandemi dan berbagai kegiatan kenegaraan.

Sementara untuk Current Affairs berbagai isu Nasional yang terjadi di ekspose dalam program Indonesia Bicara yang disiarkan setiap hari senin sampai jumat. Indonesia Bicara bertemakan kebijakan Pemerintah, isu-isu Nasional yang kuat unsur kepublikannya.

Sebagai media lembaga penyiaran publik, Bidang Berita mengedepankan faktualitas, aktualitas, edukasi dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain talkshow TVRI juga memproduksi feature dan dokumentri yang mengangkat tentang berbagai potensi Indonesia. Satu diantaranya adalah yang mengangkat tentang keindahan bawah laut.

Mengingat TVRI berusaha untuk meningkatkan pemirsa usia pemuda maka salah satu yang terus dilakukan adalah memproduksi program-program olahraga, traveling yang diminati anak muda.

Siaran olahraga saat ini berupa news buletin olahraga, pogram Rumah Bulutangkis, dan beberapa calender event di tingkat Nasional maupun Internasional.

Dengan pencapaian saat ini target kedepan Bidang Berita ingin menjadi referensi informasi di tanah air.

4.1.1.2. Rencana Kerja Bidang Program

Dalam Penyelenggaraan Siaran Program terdapat beberapa indikator untuk mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan di Direktorat Program dan Berita yaitu meningkatnya kualitas konten siaran. Ketentuan program siaran yaitu melibatkan pemangku kepentingan, mencangkup seluruh rencana program melalui transmisi konvensional, jalur multimedia, dan internet (media baru) , menjadikan TVRI sebagai Lembaga bermanfaat, memperhatikan aspek keuntungan sosial, budaya, dan kepublikan dan finansial, Pola Acara Terpadu, memperhatikan aspek sosial, budaya dan kepublikan, memperhatikan aspek sensitifitas terhadap SARA, dan potensi konflik, dan program siaran didasarkan hasil riset penonton.

Di dalam Indikator sasaran kegiatan Programming yaitu meningkatkan kualitas rencana penyiaran dengan cara merencanakan pola acara siaran nasional baik program dan berita, serta verifikasi dan monev program acara. Pemograman wajib memperhatikan faktor kompetisi televisi atau teknologi informasi yaitu isi siaran, waktu tayang, struktur acara, kemasan acara, promosi acara, kualitas audio video dan perkembangan teknologi. Pada Pola Acara TVRI meliputi Pola Dasar, Pola Lay Out, Pola Konten, dan Pola Operasional.

Setelah melakukan perencanaan pola acara maka akan dilakukan penyiapan operasional siaran baik off air dan on air untuk meningkatkan kualitas operasional siaran dengan rencana yaitu penyusunan rencana operasional siaran playback dan siaran langsung, operasionalisasi siaran program continuity siaran nasional analog, melakukan supervisi program acara siaran langsung on location/live event, kemudian melakukan evaluasi teknis pelaksanaan operasional siaran, dan penyusunan rencana operasional siaran playback dan siaran langsung kanal 3 budaya digital serta kanal 4 sport digital.

Untuk meningkatkan kualitas program di bidang program melakukan penyiapan program yang di akuisisi dengan merencanakan pembelian dan menilai kelayakan paket kerjasama produksi eksternal TVRI, dan kemudian menilai kelayakan paket produksi internal TVRI.

Perencanaan kegiatan bidang program harus menjamin program sesuai Pola Acara yang ditetapkan serta sinkronisasi program Nasional dan Daerah, menjamin operasional siaran berjalan sesuai dengan pola acara dan rundown, menjamin akuisisi sesuai dengan strategi programming, dan checking paket acara sesuai dengan arah kebijakan Dewas dan Direksi serta P3 SPS KPI, dan menjamin produksi program sesuai dengan pola acara dan kebijakan Dewas dan Direksi serta standar kualitas konten dan kemasan yang menarik dan berpedoman pada P3 SPI KPI.

Penyiapan produksi program yang dihasilkan melalui pembuatan produksi program hiburan/musik, bapora, dan drama. Adapun program pendidikan dan budaya yaitu Serambi Islami, Buah Hatiku Sayang, Satukan Shaf Indonesia, Pesona Indonesia, Sholat Jumat Istiqlal, Mari Menggambar, keliling museum, wayang kulit/orang/golek, kultum ramadhan, jelang buka puasa, jelang sahur, makanan halal, kuliner ramadhan, fashion islami, jalan-jalan ramadhan luar negeri, takbir ramadhan, idul fitri, dan bunga khatulistiwa.

Selain itu terdapat beberapa program di Drama yaitu Losmen Reborn, Lenong Bocah dan Keluarga Bunga Pada program Musik yaitu Rumah Musik Indonesia, Salam Manis, Keroncong, Instrumental, Latinos, dan sebagainya. Dari keseluruhan kegiatan di bidang program akan dilakukan evaluasi produksi mengenai pencapaian target yang sesuai dengan tujuan dan sasaran siaran program.

4.1.1.3. Rencana Kerja Bidang Penunjang Program dan Berita

Berikut kami sampaikan perencanaan Bidang Penunjang Program & Berita Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari 4 satuan kerja yakni:

1. Promosi Acara

Kegiatan di Satuan Kerja Promosi Acara terdiri dari: Make Up Montage, Promo Program & Greeting Dalam Kota, PSA Dalam Kota, PSA Luar Kota, Filler SDK, Filler Luar Kota, Video Klik SDK, Video Klip Luar Kota, TUNE Program, ID Call Versi Animasi, Fanfare Indonesia Raya, Channel Stink, Filler Promo Luar Negeri, Evaluasi Pembinaan PPnB, Konsinyering

2. Kerjasama Produksi & Siaran Luar Negeri

Kegiatan di Satuan Kerja Kerjasama Produksi & Siaran Luar Negeri terdiri dari: Sembahyang, Capacity Building, ABU Care, ABU RAI Days, ABU Children Drama Coproduction, ABU Beast of Asia, International 23rd Children Festival, Puasa di Negeri Orang, Lebaran di Negeri Orang, Broadcast Asia, ABU Robocon, Olimpiade Tokyo XXXII Jepang, Piala Eropa 2021, Qurban di Negeri Orang, 17an di Negeri Orang, MIPCOM, SPORTEL, ABU General Assembly, Global Summit Media for Children (GSMC), Napak Tilas Nusantara.

Penambahan daftar kegiatan dapat terjadi karena adanya hubungan baik yang sudah terjalin antara TVRI dengan berbagai pihak, adapun daftar agenda kegiatannya sebagai berikut: Training dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Undangan Conference, Workshop & Training, Kerjasama Produksi Internasional, Undangan Liputan dari Pihak kedutaan Negara Sahabat, Program Kerjasama Lintas Bidang.

3. Dokumentasi & Kepustakaan

Kegiatan di Satuan Kerja Dokumentasi & Kepustakaan terdiri dari: Ingest Materi Nasional, Digitalisasi Arsip Materi Audio Visual, Rekondisi Arsip Statis Audio Visual, Rekondisi Arsip Dinamis Audio Visual, Relokasi Arsip Statis Audio Visual, Sosialisasi Arsip Cetak dan Digital St. Daerah, Sosialisasi Standarisasi Arsip Audio Visual, Capacity Building dan Evaluasi PPNB, Workshop Arsip Audio Visual TVRI Pusat.

4. Kreatifitas & Pemandu Bakat

Kegiatan di Satuan Kerja Kreatifitas & Pemandu Bakat terdiri dari: Lomba produksi “Yang Terbaik” Gatra Kencana 2021, Forum Diskusi dan Evaluasi Gatra Sosialisasi Pendalaman Kreativitas, Lomba Desain Piala Gatra, Sosialisasi Lomba Produksi “Yang Terbaik”, Lomba PSA.

4.1.2. Direktorat Teknik

4.1.2.1. Rencana Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama Teknik

Keberadaan investasi swasta mengakibatkan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informatika dibidang penyiaran. Namun, walaupun infrastruktur teknologi informatika tersebut telah tumbuh dengan pesat, infrastruktur siaran berbasis pengetahuan teknologi membutuhkan infrastruktur yang sangat baik dan menjangkau segala penjuru Indonesia. Kondisi demikian memungkinkan konektivitas *high-speed band* yang merupakan perlengkapan terbaik untuk menghubungkan semua masyarakat dan bisnis penyiaran.

Saat ini, sistem pemancar di LPP TVRI belum memiliki akses teknologi jaringan internet diseluruh Indonesia sehingga dibutuhkan peningkatan yang

cukup, teknologi pengguna dan jenis aplikasi pengguna yang baru membutuhkan *bandwidth* yang lebih besar dan perangkat yang baru guna mendukung multipleksing di seluruh pemancar LPP TVRI. Hal ini sesuai visi misi LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran Publik yang berkualitas dan menjangkau siaran diseluruh nusantara.

Penanganan lalu lintas data Internet saat ini hanya bisa ditangani di masa depan dengan cara mengembangkan teknologi baru untuk mengakses jaringan, jaringan “*core*”, dan komunikasi bergerak (*mobile communication*). Sebagai infrastruktur kritis, jaringan masa depan, *platform* jaringan cerdas yang harus dipastikan aman dan andal.

Secara kuantitas dan kualitas pertimbangan jaringan ini bukan sekedar membuat perbaikan di sisi jaringan internet, tetapi juga pada pemanfaatan sistem *broadband* baru, infrastruktur berbasis IP jaringan yang ada harus dioptimalkan menjadi suatu platform yang pintar dengan kinerja dan fleksibilitas tinggi. Dalam hal ini sistem penyiaran LPP TVRI dapat menjadi handal dan jauh lebih baik lagi dalam menciptakan teknologi digital.

Selain pengembangan dalam teknologi informatika dilingkungan pemancar LPP TVRI seluruh Indonesia dibutuhkan juga support dari teknologi kelistrikan dan grounding mekanikal supaya memaksimal fungsi dari pemancar dalam bisnis system multipleksing di LPP TVRI.

Prioritas Teknologi Infomatika dan kerja sama Teknik di tahun 2021 :

1. Membangun infrastruktur teknologi informatika dalam jaringan internet disetiap pemancar LPP TVRI dalam mendukung multipleksing.
2. Membangun sistem *grounding* dilokasi satuan transmisi daerah LPP TVRI.
3. Membangun sistem kelistrikan yang jauh lebih baik lagi di stasiun TVRI daerah
4. Meningkatkan kapasitas server dan *storage* penyiaran di seluruh TVRI Stasiun Daerah.
5. Meningkatkan peralatan IT broadcast pendukung siaran berbasis internet.
6. Meningkatkan peralatan editing penyiaran TVRI pusat dan TVRI stasiun daerah
7. Memaksimal fungsi *data center* dan IT *broadcast* dengan pengadaan peralatan *data center* dan IT *broadcast*.
8. Menunjang kegiatan perkantoran yang jauh lebih baik lagi dengan menyediakan aplikasi perkantoran yang terintegrasi.
9. Memaksimal kinerja proses jaringan Teknologi informatika dalam mendukung kegiatan operasional sehari di LPP TVRI dengan pengadaan monitoring datacenter dan jaringan.
10. Melakukan peremajaan *software* berlisensi dan aplikasi kegiatan editing.

11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas *backup system* data aplikasi dalam mendukung kegiatan operasional dilingkungan LPP TVRI.
12. Melakukan rekonfigurasi *maintenance* jaringan internet di *data center* di LPP TVRI
13. Meningkatkan efektifitas teknologi informatika *system cloud* LPP TVRI yang terpusat.
14. Membangun *big data* siaran di data center.

4.1.2.2. Rencana Kerja Bidang Teknik Produksi dan Penyiaran

Penambahan peralatan studio dengan *EFP Flyaway System* yang ada di TVRI Pusat akan menghasilkan tayangan yang berkualitas sesuai dengan *standard broadcast* lengkap dapat mendukung produksi di dalam studio TVRI serta kegiatan produksi di luar studio seperti even Nasional ataupun Internasional dapat berjalan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mendapatkan kualitas gambar dan suara yang sesuai dengan standar penyiaran.

Peremajaan LED Screen dan teknologi Lighting sistem terbaru di studio TVRI Pusat, dalam Peningkatan Kualitas dan penunjang kegiatan produksi dan penyiaran serta menghasilkan tayangan yang berkualitas sesuai dengan *standard broadcast* lengkap sehingga kegiatan produksi dapat berjalan baik. dengan adanya LED Screen dan Lighting sistem di di studio TVRI Pusat maka TVRI diharapkan menjadi pioner pertelevisian Nasional serta mengurangi biaya sewa yang selama ini di lakukan, dikarenakan tidak dimiliki secara maksimal peralatan tersebut.

Peningkatan Kualitas kanal digital 4 di LPP TVRI Pusat diharapkan dapat menjadi satu struktur bagian dalam sistem manajemen penyiaran yang berformat HD dan telah diimplementasikan terintegrasi baik dengan *system management* penyiaran. secara otomatis kanal digital 4 dapat disinkronisasi dan menjadi satu sistem terintegrasi *dengan Media Asset Management*.

Dengan adanya sistem *recording* terintegrasi di TVRI Pusat, semua hasil produksi program yang bersifat *recording* maupun *live* dapat langsung diakses oleh petugas di pasca produksi untuk dilakukan proses editing juga dapat masuk dalam data base sebagai bahan siar, sehingga meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam perekaman produksi program dari semua studio di TVRI Pusat.

Peremajaan peralatan produksi studio di daerah dengan menggunakan peralatan sistem studio dengan kualitas HD akan meningkatkan kualitas gambar dan suara penyiaran di TVRI Stasiun Daerah, Sehingga kualitas peyiaran daerah udah setara dengan kualitas siaran di TVRI Pusat.

Peremajaan *lighting studio* sistem di TVRI Stasiun daerah sangat mempengaruhi dari hasil produksi di TVRI Stasiun daerah, dengan adanya peremajaan *lighting studio* sistem yang saat ini menggunakan sistem LED maka daya listrik yang digunakan lebih kecil dibanding dengan *lighting*

studio sistem yang lama, sehingga dapat mengurangi biaya tagihan listrik setiap bulannya.

Untuk mendukung pelaksanaan PON 2021 di Papua dan Olimpiade Tokyo Direktorat Teknik menyiapkan peralatan produksi dan penyiaran guna mendukung untuk peliputan serta penyiaran *event* tersebut.

Prioritas Teknik Produksi dan Penyiaran di tahun 2021 :

1. Meningkatkan kualitas video dan audio dengan peralatan yang berformat HD Direktorat Teknik akan instalasi sistem peralatan baru di 2 studio TVRI Pusat dan 3 studio di TVRI Stasiun Daerah.
2. Meningkatkan kualitas sistem pencahayaan dan pembaharuan teknologi di sistem *lighting* dari penggunaan lampu tungsten ke lampu LED sehingga efisiensi pemakaian daya listrik maka Direktorat Teknik akan menginstal sitem lighting yang baru di 2 studio TVRI Pusat dan 3 studio di TVRI Stasiun Daerah.
3. Meningkatkan kualitas penyiaran pada siaran TVRI kanal 4 maka direktorat Teknik akan meremajakan peralatan server TVRI Nasional Kanal 4 (sport).
4. Meningkatkan efektifitas sistem perekaman di seluruh studio TVRI Pusat Direktorat Teknik akan melakukan pengadaan peralatan sistem *recording* terintegrasi.
5. Meningkatkan kualitas tampilan di 2 studio TVRI Pusat Direktorat Teknik akan melaksanakan pengadaan LED Screen.
6. Meningkatkan kualitas materi siaran dari daerah maka Direktorat Teknik merencanakan mengadakan editing untuk seluruh TVRI Stasiun Daerah dan TVRI Pusat.
7. Meningkatkan kualitas peralatan produksi luar studio Direktorat Teknik akan melaksanakan pengadaan peralatan pendukung PON Papua dan Olimpiade Tokyo.

4.1.2.3. Rencana Kerja Bidang Transmisi

1. Pembangunan pemancar digital *low power* (500 W) sebanyak 13 lokasi untuk mendukung migrasi siaran televisi digital atau ASO (*Analog Switch Off*) serta menambah jangkauan populasi siaran digital sehingga masyarakat dapat lebih banyak menerima siaran digital.
2. Pembangunan Pemancar Dualcast 20 kW sebagai backup pemancar analog yang sudah berusia 10 tahun yang berada di Sembilan kota Provinsi kota Nielsen serta untuk mempersiapkan pemancar digital backup jika telah diberlakukan ASO (*Analog Switch Off*)
3. Pengadaan HPA untuk mengganti HPA pemancar digital Satuan Transmisi Palembang yang rusak berat sehingga dapat mengembalikan jangkauan populasi siaran digital di kota Palembang dan menjaga kontinuitas siaran digital di kota Palembang.

4. Untuk menjaga SLA (*Service Level Agreement*) terhadap mitra yang bergabung di Multiplexer TVRI di 12 lokasi sehingga dapat menjaga kontinuitas serta menambah kehandalan Multiplexer TVRI.
5. Pengadaan UPS 40 kVA dalam rangka mem-*backup* sementara supply catu daya ke peralatan utama selama proses *change-over* dari PLN ke Genset sehingga menjaga kontinuitas siaran serta informasi ke masyarakat tetap tersalurkan.
6. Untuk menjaga SLA (*Service Level Agreement*) terhadap mitra yang bergabung di Multiplexer TVRI dan untuk memonitor status pemancar digital dan multiplexer TVRI
7. Pengadaan Novelsat ns4 untuk mempersiapkan *downlink* TVRI di Kantor Pusat agar dapat menerima sinyal dari *event-event* internasional.
8. Pembangunan SFN dalam mendukung PM Kominfo No.6 tentang wilayah layanan dan mengatasi interferensi dalam satu wilayah layanan.
9. Pembangunan *Gap Filler* dalam rangka mengatasi *blank Spot* di 5 lokasi serta meningkatkan jangkauan populasi siaran digital.
10. Kegiatan pemeliharaan Transmisi dalam rangka memelihara dan mengembalikan fungsi dari suatu perangkat.

4.1.3. Direktorat Pengembangan Usaha

Dalam rangka Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik ada tiga indikasi program dan kegiatan Pengembangan dan Usaha sepanjang tahun 2021 yaitu:

1. Optimalisasi Pemasaran dan Penjualan Usaha Jasa Siaran
2. Optimalisasi Pemasaran dan Penjualan Usaha Jasa Non Siaran Pelayanan Publik Secara Langsung
3. Optimalisasi Strategi Pengembangan dan Usaha.

Sasaran dari sub kegiatan ketiga indikasi program dan kegiatan tersebut adalah terlaksananya:

- a) Peningkatan aktivitas pemasaran dan penjualan melalui berbagai kegiatan: *gathering point to point, visit client*
- b) Peningkatan hubungan kemitraan melalui aktivitas TVRI Day, *client handling, client maintenance*, pembuatan barang berlogo TVRI
- c) Peningkatan promosi dan publikasi produk usaha jasa siaran dan nonsiaran melalui pembuatan marketing kits, promosi di berbagai media antaralain: media luar ruang, media cetak, media sosial [*digital*], melaksanakan *event activities*, dan pembuatan *product profile*
- d) Pengkajian dalam rangka mendapatkan masukan untuk diversifikasi usaha jasa siaran dan non siaran

- e) Peningkatan *capacity building* tenaga AE dan tenaga pengembangan usaha,
- f) Peningkatan koordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk mendukung kegiatan pengembangan dan usaha yang lebih produktif.
- g) Sosialisai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku di TVRI beserta peraturan turunannya.
- h) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan dan usaha

4.1.4. Direktorat Umum

Dalam rangka mewujudkan visi TVRI menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang memotivasi, memberdayakan, menguatkan persatuan, menjaga keberagaman dan meningkatkan martabat bangsa perlu didukung oleh tata kelola Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Penguatan Barang Milik Negara dan layanan Sarana Prasarana.

4.1.4.1. Penguatan Kelembagaan

Menuju peningkatan penyiaran televisi publik di Indonesia demi mencapai Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital, berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja Pasal 60 A bahwa *Analog Switch Off* (ASO) paling lambat Tahun 2022 atau 2 tahun setelah UU Cipta Kerja disahkan tanggal 5 Oktober 2020, adalah dengan melakukan penyempurnaan beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Perbaikan atau revisi Peraturan Perundang-undangan Penyiaran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika lingkungan;
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Penyiaran (akan memasukkan tugas tambahan pengaturan tugas tambahan untuk wilayah 3T);
4. Peraturan Penyiaran Publik Televisi (turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005); dan
5. Peraturan yang dikeluarkan LPP TVRI yaitu yang berkaitan dengan Pedoman Teknis tentang Penyiaran Televisi Publik dan Manajemen setelah penyederhanaan organisasi.

Arahan kebijakan strategis dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagaimana disampaikan oleh KemenPANRB – dengan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi;
2. Restrukturisasi (*delayering*) dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
3. Peningkatan Klasifikasi TVRI Stasiun Penyiaran;
4. Peningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
5. Pengembangan Inovasi dan kreativitas.

Sesuai arahan Presiden RI dalam mewujudkan birokrasi peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik, LPP TVRI telah mengusulkan Rancangan Organisasi dan Tata Kerja dalam rangka implementasi kebijakan Penyederhanaan Birokrasi. LPP TVRI telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/911/M.KT.01/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Persetujuan Penataan Organisasi dan kesetaraan Eselon di LPP TVRI.

Dalam pelaksanaan perampingan organisasi berdampak pada penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 433 jabatan yang diusulkan, mendapatkan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/797/M.SM.02.00/2020 tanggal 2 Desember 2020 dialihkan menjadi pejabat fungsional sebanyak 388 jabatan pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugasnya yang telah dilantik pada tanggal 20 Desember 2020. yang terdiri dari atas :

1. Administrator (Jabatan Struktural Eselon III) dan
2. Pengawas (Jabatan struktural Eselon IV).

Dari segi kewenangan dan tanggungjawab manajerial, Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang ada saat ini dialihkan ke dalam jabatan fungsional tentunya perlu ada perubahan dan penyesuaian terhadap regulasi atau Standard Operating Procedure (SOP) yang berubah dan harmonisasi ulang dalam mengatur terkait butir kerja, wewenang, tanggungjawab serta tata kerja seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator dan sub koordinator suatu unit kerja.

Wilayah perbatasan adalah salah satu potensi untuk keamanan setiap Negara. Dalam konstitusi suatu Negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memperhatikan keamanan dan pembangunan infrastruktur di sekitas kawasan perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia, melalui peningkatan ketatalaksanaan dan akuntabilitas dari Pemerintah Daerah. Kedaulatan suatu negara dapat dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah beserta dengan penduduk dan pemerintahan di dalamnya. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan perbatasan langsung dengan Negara lain dan harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, LPP TVRI sebagai televisi publik perlu meningkatkan koordinasi dengan mewujudkan jumlah stasiun penyiaran baru di Ibu Kota Provinsi yang dimekarkan di Tahun 2021.

LPP TVRI juga akan meningkatkan penguatan kapasitas lembaga, yaitu :

1. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyiaran televisi publik;
3. Meningkatkan Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LPP TVRI;
4. Menerapkan “Zona Integritas” untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani); dan
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang bersih dan transparan.

Peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan publik, LPP TVRI memberikan pelayanan, yaitu :

1. Perbaikan tampilan dan konten website TVRI dan penambahan fitur untuk mempermudah akses informasi yang diperlukan publik;
2. Memperbaiki tampilan dan konten majalah Monitor produk internal LPP TVRI yang diterbitkan setiap bulan;
3. Membentuk pusat layana informasi (PPID) dan membuka layanan pengaduan melalui website, media sosial seperti, *whatsapp*, *facebook*, *Instagram* dan *twitter*;
4. Melakukan konferensi pers untuk sosialisasi program kerja dan event-event penting lainnya; dan
5. Melakukan pendaftaran hak cipta dan royalti kepada Wadah Artis Musik Indonesia dan Karya Cipta Indonesia.

4.1.4.2. Pembinaan dan Peningkatan Tata Kelola Bidang Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, SDM TVRI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS). Peningkatan kemampuan SDM secara nasional menuju keunggulan berbasis inovasi untuk mendukung perkembangan siaran digital. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal dasar untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat agar dapat bersaing secara global. Inovasi tersebut perlu memiliki dimensi pencapaian yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi, mengingat pencapaiannya akan memberikan dampak secara langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karier, hingga kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendorong pencapaian strategi pembangunan nasional. Manajemen Talenta LPP TVRI dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk memastikan keberlangsungan pengisian Jabatan-jabatan Strategis di lingkungan LPP TVRI, ataupun untuk mencetak individu-individu yang mempunyai jiwa Kepemimpinan melalui usaha Pengembangan Kompetensi yang diintegrasikan dengan Sistem Manajemen Karier LPP TVRI.

Dalam mewujudkan pengembangan inovasi SDM di lingkungan LPP TVRI, para pegawai diberikan Pendidikan dan Pelatihan baik profesi dengan yang terkait dengan penyelenggaraan produksi siaran televisi maupun bimbingan teknis untuk meningkatkan kecakapan tenaga administrasi, kenaikan golongan dan penyesuaian ijazah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS). Peningkatan kesejahteraan pegawai juga akan dilakukan mengikutsertakan pegawai pada kepesertaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi sehingga dapat mempengaruhi kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai LPP TVRI.

Dalam pengembangan manajemen ASN, Direktorat Umum akan meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan membangun sistem aplikasi HRMIS (*Human Resource Management Information System*). HRMIS mendukung integrasi data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Manfaat sistem aplikasi HRMIS :

1. Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat dan akurat;
2. Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan;
3. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala;
4. Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian seperti angka kredit pegawai;
5. Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai pendidikan dan kompetensinya;
6. Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai);
7. Memudahkan pemantauan jatah cuti Pegawai;
8. Memudahkan dalam pengelolaan beban kerja kepada pegawai;
9. Memudahkan dalam kehadiran untuk perhitungan penggajian dan tunjangan pegawai; dan
10. Memudahkan dalam proses rekrutmen pegawai.

Setiap tahun LPP TVRI mengalami pengurangan pegawai dikarenakan pensiun dan meninggal dunia. Jika tidak ada penambahan jumlah pegawai selama 5 tahun ke depan, maka jumlah pegawai LPP TVRI akan mengalami penurunan. Penurunan pegawai ASN LPP TVRI yang memasuki masa pensiun tahun 2021 - 2025 sebanyak 1.246 pegawai, sedangkan PBPNS LPP TVRI yang memasuki masa pensiun tahun 2021 - 2025 sebanyak 25 pegawai. Apabila kebutuhan pegawai tidak dapat dipenuhi maka jumlah kebutuhan SDM LPP TVRI selama 5 tahun ke depan rencana pengembangan LPP TVRI menjadi terhambat. Pemenuhan melalui rekrutmen pegawai terhadap jumlah kebutuhan pegawai ini setidaknya untuk menghindari terjadinya defisit kualitas hasil pekerjaan yang disebabkan karena beban kerja yang berlebih. Perencanaan proyeksi jumlah kebutuhan pegawai dalam 5 tahun sampai dengan 2021 - 2026 untuk menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan mengisi formasi yang kosong.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 disebutkan ada peluang perubahan status PBPNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK juga termasuk sebagai ASN non PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Perubahan status PBPNS menjadi PPPK dapat membantu dalam menangani kekurangan pegawai. Untuk skema penggajian PPPK diatur pemerintah dan berlaku secara nasional sehingga tidak didasarkan pada alokasi anggaran di satuan kerja..

4.1.4.3. Penguatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan kegiatan perumusan dan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya. Pelaksanaan penertiban terhadap penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.

Langkah awal dalam pengelolaan kekayaan negara adalah dengan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negera (RKBMN) Tahun 2022. Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. RKBMN disusun oleh Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan pedoman pada rencana strategis LPP TVRI, standar barang dan standar kebutuhan.

Pengelola barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik negara meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum agar terwujud tertib administrasi dan sekaligus akan mendukung tertib pengelolaan BMN. Pengamanan aset TVRI, khususnya aset tanah dilakukan upaya, yaitu :

1. Melakukan evaluasi perubahan nama sertifikat tanah;
2. Melakukan pemantauan perubahan sertifikat nama di 30 Stasiun Penyiaran;
3. Menyelesaikan sertifikat dokumen hukum tanah LPP TVRI;
4. Menyelesaikan permasalahan hukum litigasi BMN;
5. Melakukan percepatan sertifikat tanah di 30 Stasiun Penyiaran; dan
6. Melakukan asuransi BMN dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 2019, LPP TVRI telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui

pemeriksaan kegiatan pemutakhiran data BMN dan Rekonsiliasi data Laporan Keuangan. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN tidak dapat dipisahkan dari penyajian laporan keuangan yang handal dan akuntabel sehingga mampu mempertahankan opini WTP. Penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi pencatatan, inventarisasi dan pelaporan yang dilakukan dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah, merupakan bagian yang penting untuk dilaksanakan dengan baik. Usaha LPP TVRI menuju *Distinguished Asset Manager* tidak mungkin dicapai dengan meninggalkan penatausahaan BMN.

4.1.4.4. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Direktorat Umum juga memberikan pelayanan sarana dan prasarana gedung, kantor dan lingkungan di LPP TVRI untuk kelancaran kerja melalui *supporting unit*. Kegiatan pelayanan melalui ketersediaan kendaraan dinas, mengadakan perawatan untuk aspek yang tercakup meliputi gedung kantor (kebersihan, keamanan, tampilan luar), lingkungan kantor (lahan parkir yang aman, halaman kantor dan/atau gudang yang memadai), kebersihan lingkungan kerja bagi karyawan, terjaganya sirkulasi udara yang baik serta perawatan instalasi listrik penerangan (*mechanical & electrical*). Di Tahun 2021, pekerjaan yang akan dilakukan, yaitu :

1. Menyiapkan design bangunan, studio produksi siaran, dan tower TVRI di Ibu Kota baru;
2. Membangun Rumah Jaga Operator Transmisi di 30 Pemancar;
3. Pembangunan Tower yang berlokasi di Pujud di NTB, Gunung Segi di Bali dan Bukit Tajam di Belitung;
4. Membangun Rumah Dinas karyawan yang terdampak gempa di Mamuju, Sulawesi Barat;
5. Renovasi ruang kerja Kantor Pusat;
6. Membangun studio dan kantor di Bangka Belitung;
7. Memasang *fire alarm* di Kantor Pusat;
8. Penggantian Trafo di LPP TVRI Kantor Pusat ;
9. Memastikan keamanan dan kebersihan di lingkungan LPP TVRI Kantor Pusat; dan
10. Menyiapkan ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional maupun non operasional.

4.1.5. Direktorat Keuangan

4.1.5.1 Rencana Kerja Koordinator Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja

A. Sub Koordinator Perencanaan Keuangan dan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L dengan berpedoman pada RPJMN. Renstra K/L adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi K/L dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional

yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Selanjutnya, adanya dokumen perencanaan yang harus disusun untuk periode 1 (satu) tahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan PMK No. 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, yaitu Renja K/L dan RKA-K/L yang secara formal dan materil merupakan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan Renja dan RKA-K/L dilakukan sebelum tahun tersebut dijalankan, contoh untuk TA 2021, penyusunannya dilakukan pada tahun 2020.

Selain itu, pada tahun berjalan, terdapat perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Adanya perubahan rincian anggaran tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan dan administrasi selama tahun berjalan. Revisi anggaran dapat dilakukan dengan memerhatikan Peraturan Menteri Keuangan dan diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021.

a) Rencana Strategis Tahun Anggaran 2020 - 2024

Penyusunan Renstra di Tahun Anggaran 2021 akan menghasilkan dokumen Renstra Unit Eselon II untuk Dit. Keuangan, Dit. Umum, SPI, Pusdiklat, Puslitbang, Dit. Teknik, Dit. Program dan Berita, Dit. Pengembangan Usaha, serta TVRI Stasiun Daerah Kelas A dan B.

b) Rencana Kerja

Dokumen yang disusun meliputi narasi dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk diunggah ke e-Sakip.

c) Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2022

Terdapat 3 (tiga) proses utama dalam penyusunan RKA-K/L, yaitu penyusunan Pagu Indikatif, penyusunan Pagu Anggaran, dan penyusunan Alokasi Anggaran.

d) Revisi Rencana Kerja dan Anggaran K/L

Revisi RKA-K/L terbagi menjadi Revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Untuk Revisi POK pelaksanaannya dilakukan setiap bulan, sedangkan untuk Revisi DIPA pelaksanaannya bergantung pada adanya pengajuan revisi dari direktorat dan keputusan pimpinan.

e) Pengembangan Manajemen Keuangan

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU) serta koordinasi dengan Para PPK, PPSPM, Kepala UKPBJ, Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa, Pokja dan Para Staf Pengelola Keuangan setiap bulannya.

- B. Sub Koordinator Evaluasi Keuangan dan Kinerja
 - a) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periodik
Pembuatan Laporan Bulanan Evaluasi Pemantauan serta Laporan Triwulan 1 - 4 Evaluasi Pemantauan, baik Kantor Pusat maupun Stasiun Penyiaran Daerah.
 - b) Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Pembuatan Laporan Bulanan Evaluasi Pemantauan.
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pembuatan Laporan Bulanan Evaluasi Pemantauan serta Laporan Semester.
 - d) Evaluasi dan Pelaporan Kinerja TVRI
Pembuatan dokumen Lakip TVRI Tahunan.
 - e) Penyusunan Laporan Tahunan TVRI
Pembuatan dokumen Laporan Tahunan TVRI dan dokumen Laptan Direktorat Keuangan TVRI.
 - f) Penilaian Kinerja Manajemen Daerah
Pembuatan Laporan Triwulan 1 - 4 penilaian kinerja daerah dengan data bulanan dari daerah.

4.1.5.2 Rencana Kerja Koordinator Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

A. Sub Koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sebagian dana Penerimaan PNBPF fungsional LPP TVRI digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan jenis PNBPF oleh instansi yang bersangkutan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 938/KMK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, paling tinggi sebesar 80%, Pengajuan SEMP dapat dilakukan beberapa kali dalam satu Tahun Anggaran tergantung penerimaan yang disetorkan ke Kas Negara serta sesuai dengan kebutuhan yang tergantung pada besarnya Pagu Pengeluaran/DIPA.

Pengelolaan atas Kerjasama Siaran dan Non Siaran dengan terbentuknya laporan Penerimaan PNBPF dimulai dengan mendapatkan data awal dari Direktorat Pengembangan Usaha khususnya pada bagian Penjualan dan Pemasaran Siaran dan Non Siaran yang sudah diapproved oleh pejabat terkait dari APRINA selanjutnya membuat register nomor surat tagihan dan invoice sebagai dasar nomor urut surat tagihan dan invoice selanjutnya direkap sebagai bahan pembuatan laporan penerimaan PNBPF.

Jika ada pembayaran dari mitra maka dilakukan pemeriksaan penerimaan dari Rekening Koran Bank harian apabila ada pembayaran yang masuk maka dibuatkan *billing* Simponi untuk disetorkan ke kas negara dan diteruskan dengan membuat buku penerimaan dengan meregister nomor kuitansi sebagai dasar nomor urut kuitansi dan direkap sebagai bahan pembuatan laporan penerimaan PNBPNBP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

- a) Pengusulan Penggunaan SEMP PNBPNBP
Pembuatan Surat Pengajuan SEMP.
- b) Pengelolaan Penerimaan PNBPNBP atas Kerjasama Siaran
Pembuatan Laporan PNBPNBP bulanan atas kerjasama siaran yang telah jatuh tempo.
- c) Pengelolaan Penerimaan PNBPNBP atas Pemanfaat Kerjasama Non Siaran bulanan.
Pembuatan Laporan PNBPNBP bulanan atas pemanfaat kerjasama non siaran yang telah jatuh tempo.
- d) Pengelolaan Anggaran Bendahara Penerimaan PNBPNBP
Pembuatan Laporan Silabi Penerimaan bulanan.

B. Sub Koordinator Pengeluaran Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara dan Tanggung Jawab Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, dan atau Pembuat Daftar Gaji maka perlu diaturnya tata cara pencairan Gaji, Uang Makan, dan Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil lainnya, Pegawai Kontrak, Pegawai Pramubakti dan Penyiar yang berasal dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang dibuat oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan Gaji, Uang Makan, dan Tunjangan-tunjangan lainnya untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil lainnya, Pegawai

Kontrak, Pegawai Pramubakti dan Penyiar lainnya bersumber dari DIPA untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Mekanismenya dimulai dari melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik (SPP, SPM) dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur; memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya; memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK; mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

- a) Koordinasi Pengelolaan Surat Penghentian Pembayaran Pensiun dan Mutasi Pembayaran
Pembuatan SKPP Semester I dan II.
- b) Pembuatan dan Penerbitan SPP
Pembuatan rekapitulasi SPP bulanan.
- c) Pengelolaan Pengeluaran Belanja Gaji dan Tunjangan
Pembuatan dokumen pelayanan pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, PBPNS, dan Pegawai Kontrak.
- d) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Pembuatan dokumen pertanggungjawaban pelayanan pengeluaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Kontrak Lapangan, Satpam, Driver, dan Pramubakti.

C. Sub Koordinator Perbendaharaan dan Verifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan

sebagai Bendahara maka perlu diaturnya tata cara pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab yang selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA selanjutnya untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja mempunyai tugas juga dalam melaporkan realisasi pengelolaan uang, sisa pagu DIPA serta rekonsiliasi pengeluaran setiap bulannya sesuai dengan norma transparansi dan pengelolaan yang baik.

- a) Pembuatan dan Penerbitan SPP
Pembuatan rekapitulasi SPP bulanan.
- b) Pembuatan dan Penerbitan SPM dan SP2D
Pembuatan rekapitulasi SPM dan SP2D bulanan.
- c) Pengelolaan Anggaran Bendahara Pengeluaran
Pembuatan laporan realisasi dan sisa pagu DIPA bulanan.
- d) Data Rekonsiliasi Pengeluaran
Pembuatan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulanan.

D. Sub Koordinator Pengelolaan dan Evaluasi Utang Piutang

Tunggakan merupakan tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tahun-tahun sebelumnya namun belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang lalu. Mekanisme penyelesaian tunggakan melalui permohonan persetujuan pembayaran yang disetujui oleh KPA selanjutnya pengajuan bahan untuk direviu oleh SPI dan BPKP sebagai pihak pemeriksa yang berwenang yang selanjutnya menghasilkan dokumen rekomendasi penghapusan serta dokumen utang atau tunggakan lainnya.

Dalam rangka penyelesaian piutang negara yang lebih efektif dan efisien diperlukan pengurusan secara optimal. Penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada panitia cabang. Terkait penagihan diterbitkan oleh Kepala Satker K/L yang ditujukan kepada pihak terutang namun jika sampai pada tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran maka terbitlah surat penagihan kedua dan ketiga. Untuk penyerahan dokumen piutang PNBPN berasal dari PNBPN yang berlaku di LPP TVRI yang dimasukkan ke dalam aplikasi penerimaan dan pengembangan usaha (APRINA).

Dalam pelaksanaan teknis pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang meliputi laporan data piutang denda, laporan pengiriman piutang/ piutang denda serta laporan analisa piutang.

a) Pengelolaan Data Utang/Tunggakan

Pembuatan Laporan Data Tunggakan Tahun Lama dan Tahun Anggaran sebelumnya, Persetujuan Pembayaran oleh KPA, Pengajuan Reviu SPI, Pengajuan Reviu BPKP, Laporan Evaluasi Penetapan Rekomendasi, serta Dokumen Utang/Tunggakan.

b) Pengelolaan Piutang PNBP

Pembuatan data Invoice dan Penerimaan aplikasi APRINA, Laporan Data Penagihan Piutang/Piutang Denda Tahap 1 - 3, Laporan Piutang PNBP, Dokumen Piutang, Penyerahan Piutang KPKNL, Data Piutang Denda, Laporan Pengiriman Piutang/Piutang Denda, serta Laporan Analisa Piutang.

4.1.5.3 Rencana Kerja Koordinator Akuntansi, Manajemen Resiko, dan Perpajakan

A. Sub Koordinator Akuntansi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara bahwa setiap K/L menjalani langkah-langkah yakni melakukan telaah atas LK mulai dari tingkat satker, wilayah, Eselon I, memastikan bahwa saldo kas dibendahara pengeluaran sama dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Aplikasi Silabi.

Melakukan penatausahaan seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, piutang serta mengoptimalkam peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian dan kualitas LKKL sehingga LKKL unaudited/audied dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat dan berkualitas.

a) Laporan Keuangan Periodik Unaudited

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat dan Laporan Konsolidasi Triwulan, Semester, dan Akhir Tahun.

b) Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pusat

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pusat dan Laporan Konsolidasi.

c) Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan bulan Januari sampai dengan Desember.

d) Laporan Keuangan Audited

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Audited.

B. Sub Koordinator Manajemen Risiko

Sesuai dengan Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilanjutkan dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 13/PRTR/DIREKSI/TVRI/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia maka sub koordinator Manajemen Risiko memiliki tugas untuk mengawal amanah ini dengan beberapa kegiatan yang esensial dalam SPIP.

Kegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan SPIP yang memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan lembaga melalui kegiatan efektif dan efisien, pengamanan asset negara, kehandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan LPP TVRI. Salah satu poin penting dalam hal tersebut adalah penilaian SPIP dan Manajemen Risiko. Upaya ini untuk menghindari dan melindungi LPP TVRI dari segala kemungkinan risiko signifikan yang diperkirakan dapat menggagalkan atau menghambat tercapainya tujuan dari suatu kegiatan.

- a) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Pembuatan Laporan Rencana Penyelenggaraan SPIP, Laporan Penyelenggaraan SPIP Pusat dan Daerah, serta Laporan Pengendalian Internal Direktorat Keuangan.
- b) Koordinasi dan Asistensi Penyelenggaraan Manajemen Risiko
Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Semester 1 dan 2.

C. Sub Koordinator Perpajakan

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu : Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dan Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah maka pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didalamnya mengatur pencatatan dan verifikasi pajak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. SPT Orang Pribadi dilaporkan langsung oleh Wajib Pajak (WP) dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

- a) Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan Pajak Masa Pembuatan Laporan PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 4 ayat 2) dan PPN Masa per Januari sampai dengan Desember.
- b) Pencatatan, Verifikasi, dan Pelaporan Pajak Tahunan Pembuatan Laporan SPT PPh Orang Pribadi (OP) Tahunan.

4.1.6. Pusdiklat

Sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Pusdiklat LPP mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk SDM LPP TVRI yang akan menunjang seluruh kegiatan operasional di LPP TVRI. Sesuai dengan peran dan kewenangan, Pusdiklat dapat memberikan kontribusi terhadap Visi Misi melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Adapun Tujuan dan sasaran Pusdiklat adalah sebagai berikut: Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Negara LPP TVRI. Dengan sasaran Pusdiklat yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan, program dan evaluasi diklat. Serta Meningkatkan Pengembangan Teknologi Pembelajaran
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat
3. Meningkatkan kualitas fasilitas dan sarana diklat

Pusdiklat telah menyusun Program tahunan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan Program & evaluasi serta Pengembangan Teknologi Pembelajaran
2. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan standar kompetensi dan sertifikasi
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas Fasilitas dan Sarana Diklat.

4.1.7. Puslitbang

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puslitbang LPP TVRI di tahun 2021 adalah:

4.1.7.1. Bidang Pengkajian Program dan Berita

- Langgan Data Kepemirsaaan Per Hari (Daily) Nielsen dan ADEX TAHUN 2021
Penyediaan data rating dan share harian untuk semua program acara yang ditayangkan oleh LPP TVRI, termasuk profil demografi penonton, untuk 11 kota yang menjadi daerah penelitian oleh Lembaga Survei Nielsen.
- Bedah Kualitas Program dan Berita Berdasarkan Keinginan Publik
FGD yang dilakukan untuk mengetahui kebiasaan masyarakat menonton televisi khususnya TVRI, mengumpulkan pendapat meliputi persepsi, kritik, dan saran mengenai program TVRI, mengidentifikasi penerimaan terhadap program TVRI dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program siaran TVRI.
- Kajian Dampak Penyiaran Sebagai Pemersatu Bangsa
Kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak siaran televisi terhadap masyarakat serta dampak tayangan televisi dalam pengaplikasian nilai-nilai Pancasila baik dalam lingkungan pribadi, keluarga, kelompok dan masyarakat serta Negara.

4.1.7.2. Bidang Pengkajian Pengembangan Usaha

4.1.7.2.1. Kajian Share Market

Kajian yang dilakukan untuk menghasilkan referensi alternatif yang memiliki tingkat kepercayaan dan validitas memadai sebagai bahan pertimbangan di dalam proses pengambilan keputusan Manajemen LPP TVRI secara profesional dan tepat sasaran. Dari hasil kajian diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada para pemasang iklan agar dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP LPP TVRI melalui strategi yang tepat

4.1.7.2.2. Kajian Potensi Mitra Kerja [Potensi PNBP & Non-PNBP]

Kajian ini diharapkan dapat menjawab, harapan dan keinginan yang dapat membuat Kementerian dan lembaga negara, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dan SKPD untuk menjadi mitra potensial TVRI serta merumuskan hal-hal yang perlu diupayakan oleh TVRI agar dapat menjaring mitra potensial tersebut menjadi mitra yang loyal

4.1.7.2.3. Kajian Kebutuhan Masyarakat Terhadap Konten Iklan

Kajian ini bertujuan untuk menggali seberapa besar minat pemirsa televisi terhadap iklan layanan masyarakat yang bernilai edukatif dan inspiratif, serta mengetahui apakah iklan layanan masyarakat masih dibutuhkan oleh pemirsa televisi di tanah air dan model iklan layanan masyarakat yang seperti apa yang dibutuhkan oleh pemirsa di seluruh tanah air.

4.1.7.2.4. Evaluasi Kepuasan Mitra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan mitra dalam berbagai hal dalam kerjasama yang telah berjalan dan harapannya kedepan, mengetahui kekurangan TVRI dalam melayani mitra untuk kajian perbaikan, dan mengetahui keinginan Mitra dalam hal potensi kerjasama yang diinginkan.

4.1.7.3. Bidang Pengkajian Kelembagaan

4.1.7.3.1. Kajian Teknokratik dan Penyusunan RENSTRA

Kajian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan rumusan tentang pandangan, sumbang pikiran, masukan dan saran sebagai bagian upaya penguatan kelembagaan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

4.1.7.3.2. Kajian Pelayanan Umum

Kajian yang dilakukan untuk menjadi bagian dari referensi bagi satuan kerja terkait serta sebagai bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja Puslitbang LPP TVRI.

4.1.7.3.3. Kajian Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)

Dari kajian ini diharapkan dapat dilihat gambaran bagaimana standar kebutuhan sumber daya manusia di Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI. Untuk mendapatkan informasi yang berkelanjutan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, diharapkan Kajian Manajemen ASN dapat dilaksanakan secara berkala, sehingga pengaruh beban kerja dan kebutuhan pegawai dapat tergambar.

4.1.7.3.4. Kajian Manajemen Talenta

Kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengapresiasi SDM TVRI sesuai profesi di dalam melaksanakan tugas struktural & fungsional sehari-hari.

4.1.7.3.5. Evaluasi dan Disain Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan rumusan tentang pandangan, sumbang pikiran, masukan dan saran sebagai bagian upaya penguatan kelembagaan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

4.1.7.4. Bidang Pengkajian Teknologi

4.1.7.4.1. Kajian Kekuatan Jaringan

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh data kekuatan jaringan teknik terkini di TVRI Stasiun Penyiaran Daerah.

4.1.7.4.2. *Focus Group Discussion* (FGD) Teknologi Informasi dan Multiplatform

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk memberikan Rekomendasi kepada Direktorat Teknik, Direktorat Pengembangan Usaha,

Direktorat Umum dan Direktorat Keuangan terkait Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Multiplatform dalam rangka meningkatkan kualitas layanan siaran TVRI.

4.1.7.4.3. Kajian Peralatan Studio

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan dan menggali informasi dalam bentuk form pengisian data yang sistematis, metodologis sehingga mudah dipahami, dimengerti dan dapat diimplementasikan di lingkungan Puslitbang LPP TVRI, Direktorat Teknik serta stakeholder lainnya, serta melakukan pendampingan terhadap Direktorat Teknik dalam proses migrasi dari analog ke digital

4.1.8. SPI

4.1.8.1. Supervisi dan Koordinasi

Supervisi audit merupakan bagian dari upaya manajemen tim audit untuk memberikan jaminan dan keyakinan agar penugasan audit dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar setiap internal auditor dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik diperlukan peranan supervisi dari lini pimpinan SPI. Dalam kegiatan audit, Supervisi mencakup pengarahan yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai.

Penyelenggaraan kegiatan lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja baik itu aspek kepegawaian, aspek tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan dan aspek pengelolaan barang milik negara. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh satker di lingkungan LPP TVRI.

4.1.8.2. Pelaksanaan Audit

a. Audit dan Evaluasi Rutin

Kegiatan audit dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan pengamatan yang seksama terhadap pelaksanaannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan.

Audit Internal memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu Manajemen terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen risiko, serta pengendalian

internal untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan dengan optimal. Fungsi dan tanggung jawab audit ini diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip independen, profesional dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional LPP TVRI.

b. Audit Khusus

Kegiatan audit khusus merupakan audit yang dilakukan jika dalam pelaksanaan kegiatan operasional/kinerja maupun operasional terdapat indikasi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Audit khusus antara lain meliputi audit investigasi dan ketaatan.

Audit khusus dilaksanakan berdasarkan perintah dari Direktur Utama LPP TVRI dan atau sesuai dengan kebutuhan. Audit ini adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang.

4.1.8.3. Tindak Lanjut Hasil LHP

a. Pendampingan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPK

Tindak lanjut hasil audit BPK RI dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa manajemen telah mengambil koreksi atas berbagai temuan BPK RI yang dilaporkan atau manajemen telah menetapkan besarnya risiko yang dihadapi jika tidak dilakukan tindakan koreksi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu Instansi pemerintah adalah dengan melihat seberapa aktif instansi pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

b. Pemantauan Hasil Audit Internal

Kegiatan pemantauan hasil audit internal merupakan proses untuk memonitor pelaksanaan rekomendasi dari hasil audit internal yang telah dilaksanakan. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh Inspektorat (internal auditor) salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi audit untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor.

4.1.8.4. Reviu Perencanaan Penganggaran

a. Reviu RKA-K/L

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penelaahan terhadap RKA-KL yang disusun oleh LPP TVRI Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Penyiaran apakah telah sesuai dengan Visi dan Misi LPP TVRI. Kegiatan Reviu RKA-K/L berupa penelaahan dan pemeriksaan data-data yang tercantum dalam RKA-K/L LPP TVRI Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Penyiaran yang dilakukan oleh auditor/pegawai Satuan Pengawasan Intern dengan melibatkan satuan kerja terkait.

b. Reviu Laporan Keuangan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan LPP TVRI dilaksanakan berupa penelaahan dan pemeriksaan data-data yang didukung dari Laporan Keuangan LPP TVRI Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Penyiaran dengan melibatkan pegawai Satuan Pengawasan Intern.

c. Reviu RKBMN

Kegiatan Reviu RKMBN dipandang perlu untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif di lingkungan LPP TVRI yang dilakukan oleh Tim Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan RKBMN. Kegiatan ini sebagai optimalisasi penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang dan efektivitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Lembaga.

d. Reviu Permintaan Tertentu

Kegiatan Reviu atas Permintaan Tertentu merupakan suatu tinjauan, ringkasan atau tinjauan reviu yang dilakukan atas permintaan tertentu serta memberikan analisis dari ringkasan temuan dan rekomendasi terkait dari temuan reviu. Reviu atas permintaan tertentu dilaksanakan berdasarkan perintah dari Direktur Utama LPP TVRI dan atau sesuai dengan kebutuhan. Reviu dilakukan untuk memberikan pernyataan tentang dasar prosedur namun tidak memerlukan bukti secara keseluruhan seperti audit.

4.1.8.5. Kapabilitas APIP

a. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Penilaian Mandiri SPIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu

kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator.

4.1.8.6. Peningkatan Kualitas SDM

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas SDM SPI LPP TVRI maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan profesi auditor sehingga terciptanya SDM yang profesional dan kapabel serta bertanggungjawab pada Satuan Pengawasan Intern Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas SDM SPI LPP TVRI.

Tabel 4.4 Total Alokasi Pagu Alokasi Anggaran LPP TVRI Pusat

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021 (Dalam Ribuan)		
		RUPIAH	PNBP	TOTAL
5147	Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	232.341.394,0	1.000.000,0	233.341.394,0
5148	Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI	75.093.848,0	15.181.904,0	90.275.752,0
5149	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI	3.783.680,0	0,0	3.783.680,0
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik	6.714.722,0	2.500.000,0	9.214.722,0
5151	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik	3.474.375,0	1.000.000,0	4.474.375,0
5152	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran TV Publik	286.500.000,0	18.080.538,0	304.580.538,0
5153	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	142.620.000,0	28.080.641,0	170.700.641,0
5154	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	5.223.356,0	3.250.000,0	8.473.356,0
Total		755.751.375,00	69.093.083,00	824.844.458,00



BAB V PENUTUP

Dalam Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya kualitas penyelenggaraan layanan penyiaran publik dalam menunjang pencapaian target pembangunan nasional. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah khususnya melalui sumber pembiayaan APBN (Rp. Murni) dalam menyediakan infrastruktur penyiaran publik tersebut. Oleh karena itu sejak tahun ini, semua unit stasiun baik ditingkat pusat dan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan lainnya melalui pemanfaatan dana sewa multiplexser dengan skema Kerja Sama dengan mitra kerja lainnya serta sumber pembiayaan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 ini tergantung pada komitmen, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin dari para penyelenggara pemerintahan baik TVRI stasiun pusat dan daerah dan dukungan instansi terkait lainnya serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan pelayanan penyiaran publik bagi masyarakat.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang penyiaran publik harus bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja LPP TVRI Tahun 2021 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan secara optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN 1
FORMULIR 1 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

2. VISI : Terwujudnya LPP TVRI Yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil

Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

3. MISI :

1. Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi Serta Analisis Yang Cepat, Akurat dan Responsif Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Negara Sesuai Kewenangan LPP TVRI
2. Menyelenggarakan Pelayanan Yang Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Sumber-Sumber, Pengawasan, Administrasi Umum, Informasi dan Hubungan Kelembagaan LPP TVRI
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana LPP TVRI

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2021 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	137.520.000,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6.000.000,0
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	271.753.809,0
Total		415.273.809,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas konten (yang meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik		341.089.922,00
01.01	Audience Share/Rating	2,0	
01.02	Public Values	3,1	
01.03	Public Participation	1,2	
01.04	Populasi yang Terlayani Pelayanan Digital	70	
01.05	Share Nilai Marketing Terhadap Pendapatan	9,5	
02	Meningkatnya Kualitas Internal Kelembagaan		483.754.536,00
02.01	Opini BPK	WTP	
02.02	Indeks RB	70	
02.03	Indeks Layanan Publik	8,7	
02.04	Nilai SAKIP	70	
02.05	Zona Integritas	7	
02.06	Jumlah Peningkatan PNBPN	366,0	
Total			824.844.458,00

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
117.GC	Program Penyiaran Publik	434.343.357,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.411.179,00	0,0	0,0	0,0	483.754.536,00	0,0	0,0	0,0
117.WA	Program Dukungan Manajemen	321.408.019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.681.904,0	0,0	0,0	0,0	341.089.922,00	1,0	0,0	0,0
Total		755.751.376,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.093.083,00	0,0	0,0	0,0	824.844.458,00	1,0	0,0	0,0

LAMPIRAN 2
FORMULIR 2 : PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : 01 - Meningkatnya kualitas konten (yang meliputi pendidikan, budaya, Pendidikan agama, dan infrastruktur)
penyiaran TV Publik
3. **PROGRAM** : Program Penyiaran Publik
4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	137.520.000,0
03.04	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	86.520.000,0
03.07	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	51.000.000,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6.000.000,0
04.03	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	6.000.000,0
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	271.753.809,0
05.05	Transformasi Digital	271.753.809,0
Total		415.273.809,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas Program dan Berita		170.700.641,0
01.01	Jumlah Siaran Berita, Pendidikan, Budaya, Agama dan Hiburan	52560	
02	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran		304.580.538,0
02.01	Coverage Area	70	
02.02	Coverage Population	72	
02.03	Digitalisasi Penyiaran	80	
Total			483.754.536,00

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	483.754.536,00
01.01	Dukungan Peralatan Teknik yang Memadai dalam Pengembangan Teknologi Broadcasting di masa yang akan datang	
01.02	Produksi Program dan Berita yang Mampu Mempererat Rasa Persatuan dan Kesatuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	
01.03	Dukungan Peningkatan Mutu Produksi Acara dan Penyiaran LPP TVRI	
01.04	Peningkatan Kecintaan Pemirsa Terhadap Produksi dan Penyiaran LPP TVRI melalui Penyiaran Nasional dan Regional	
Total		483.754.536,00

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
5152	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran TV Publik	286.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.080.538,0	0,0	0,0	0,0	304.580.538,0	0,0	0,0	0,0
5153	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	142.620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.080.641,0	0,0	0,0	0,0	170.700.641,0	0,0	0,0	0,0
5154	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	5.223.356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.250.000,0	0,0	0,0	0,0	8.473.356,0	0,0	0,0	0,0
Total		434.343.356,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.411.179,00	0,0	0,0	0,0	483.754.535,00	0,0	0,0	0,0

**FORMULIR 2 : PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Meningkatnya Kualitas Internal Kelembagaan
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL :
5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI		341.089.923
01.01	Jumlah Penerapan WBK dan WBBM	37	
Total			341.089.923

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	341.089.923
01.01	Kegiatan yang Terukur, Berkualitas, Efektif, Efisien, Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan	
Total		341.089.923

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)	
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN							
5147	Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	232.341.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	233.341.394,0	1,0	0,0
5148	Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI	75.093.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.181.904,0	0,0	0,0	0,0	90.275.752,0	0,0	0,0
5149	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI	3.783.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.783.680,0	0,0	0,0
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik	6.714.722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	9.214.722,0	0,0	0,0
5151	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik	3.474.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	4.474.375,0	0,0	0,0
Total		321.408.019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.681.904,0	0,0	0,0	0,0	341.089.923	0,0	0,0

LAMPIRAN 3
FORMULIR 3 :KEGIATAN TEKNIK
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. **PROGRAM** : GC - Program Penyiaran Publik
3. **SASARAN PROGRAM** :
- i. Meningkatnya Kualitas Program dan Berita
 - ii. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran
4. **KEGIATAN** : 5152 - Pengembangan Infrastruktur Penyiaran TV Publik
5. **5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : Direktorat Teknik
6. **SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Perencanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Serta Pengembangan Teknologi Digital Penyiaran TV Publik		0,0
01.01	Jumlah Laporan Kegiatan Teknik	1	
02	Terwujudnya Migrasi Infrastruktur, Peralatan Produksi dan Penyiaran yang Berbasis Teknologi Digital Dalam Penyiaran TV Publik		304.580.538,0
02.01	Jumlah Pengadaan Teknik Produksi dan Penyiaran, Transmisi, dan Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik	80	
Total			304.580.538,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output/ Komponen	Lokasi		Nawacita	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Dukungan (Tematik)	100 Janji Presiden	Alokasi (Rp Ribu)
		Provinsi	Kabupate n/ Kota								
02	<i>Terwujudnya Migrasi Infrastruktur, Peralatan Produksi dan Penyiaran yang Berbasis Teknologi Digital Dalam Penyiaran TV Publik</i>										304.580.538,0
02.QMA	Data dan Informasi Publik										304.580.538,0
02.QMA.001	Sarana Prasarana Transmisi TV Publik Nasional								001 - Anggaran Infrastruktur	•	3.200.000,0
	111 - Peralatan dan Mesin										3.200.000,0
		Pusat	Pusat								3.200.000,0
02.QMA.002	Sarana Prasarana Peralatan Produksi dan Penyiaran TV Publik Nasional								• 000 - Bukan Tematik	•	29.626.729,0
	051 - Rencana Program Teknik										686.442,0
		Pusat	Pusat								686.442,0
	052 - Pelaksanaan dan Pemantauan Teknik										1.203.616,0
		Pusat	Pusat								1.203.616,0
	053 - Laporan Evaluasi Teknik										609.942,0

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output/ Komponen	Lokasi		Nawacita	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Dukungan (Tematik)	100 Janji Presiden	Alokasi (Rp Ribu)
		Provinsi	Kabupaten/ Kota								
		Pusat	Pusat								609.942,0
	054 - Kewajiban BHP										8.000.000,0
		Pusat	Pusat								8.000.000,0
	111 - Peralatan dan mesin										19.126.729,0
		Pusat	Pusat								19.126.729,0
02.QMA.0 03	Sarana dan Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	• 000 - Bukan Tematik	•	43.563.228,0
	111 - Peralatan dan Mesin										43.563.228,0
		Pusat	Pusat								43.563.228,0
02.QMA.0 04	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	• 000 - Bukan Tematik	•	228.190.581,0
	111 - Peralatan dan Mesin										228.190.581,0
		Pusat	Pusat								228.190.581,0
Total											304.580.538,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
02	Terwujudnya Migrasi Infrastruktur, Peralatan Produksi dan Penyiaran yang Berbasis Teknologi Digital Dalam Penyiaran TV Publik				304.580.538,0				0,0	0,0	0,0
02.QMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan		304.580.538,0				0,0	0,0	0,0
02.QMA.001	Sarana Prasarana Transmisi TV Publik Nasional	1	layanan		3.200.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.QMA.001.111	Peralatan dan Mesin	16,0	Unit	200.000,0	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002	Sarana Prasarana Peralatan Produksi dan Penyiaran TV Publik Nasional	1	layanan		29.626.729,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002.051	Rencana Program Teknik	1,0	Layanan	686.442,0	686.442,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002.052	Pelaksanaan dan Pemantauan Teknik	1,0	Layanan	1.203.616,0	1.203.616,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002.053	Laporan Evaluasi Teknik	1,0	Layanan	609.942,0	609.942,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002.054	Kewajiban BHP	1,0	Layanan	8.000.000,0	8.000.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.002.111	Peralatan dan mesin	23,0	Unit	831.596,9	19.126.729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.003	Sarana dan Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON	1	layanan		43.563.228,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.QMA.003.111	Peralatan dan Mesin	10,0	Unit	4.356.322,8	43.563.228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QMA.004	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital	1	layanan		228.190.581,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.QMA.004.111	Peralatan dan Mesin	153,0	Unit	1.491.441,7	228.190.581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					304.580.538,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
02	Terwujudnya Migrasi Infrastruktur, Peralatan Produksi dan Penyiaran yang Berbasis Teknologi Digital Dalam Penyiaran TV Publik		286.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.080.538,0	0,0	0,0	0,0	304.580.538,0
02.QMA	Data dan Informasi Publik		286.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.080.538,0	0,0	0,0	0,0	304.580.538,0
02.QMA.001	Sarana Prasarana Transmisi TV Publik Nasional		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
02.QMA.001.111	Peralatan dan Mesin	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
02.QMA.002	Sarana Prasarana Peralatan Produksi dan Penyiaran TV Publik Nasional		14.746.191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.880.538,0	0,0	0,0	0,0	29.626.729,0
02.QMA.002.051	Rencana Program Teknik	Utama	686.442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686.442,0
02.QMA.002.052	Pelaksanaan dan Pemantauan Teknik	Utama	1.203.616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.203.616,0
02.QMA.002.053	Laporan Evaluasi Teknik	Utama	609.942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609.942,0
02.QMA.002.054	Kewajiban BHP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0
02.QMA.002.111	Peralatan dan mesin	Utama	12.246.191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.880.538,0	0,0	0,0	0,0	19.126.729,0
02.QMA.003	Sarana dan Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON		43.563.228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.563.228,0
02.QMA.003.111	Peralatan dan Mesin	Utama	43.563.228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.563.228,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
02.QMA.004	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital		228.190.581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228.190.581,0
02.QMA.004.111	Peralatan dan Mesin	Utama	228.190.581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228.190.581,0
Total			286.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.080.538,0	0,0	0,0	0,0	304.580.538,0

LAMPIRAN 4
FORMULIR 3 : KEGIATAN PROGRAM DAN BERITA
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. **PROGRAM** : GC - Program Penyiaran Publik
3. **SASARAN PROGRAM** :

- 01 - Meningkatnya Kualitas Program dan Berita
- 02 - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran

4. **KEGIATAN** : 5153 - Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik
5. **UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : Direktorat Program Dan Berita
6. **SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Program Siaran Berita, Hiburan, Pendidikan dan Budaya		170.700.641,0
01.01	Jumlah Penyelenggaraan Siaran Berita, Pendidikan, Hiburan	1	
01.02	Jumlah Penyelenggaraan Penunjuang Siaran	1	
01.03	Jumlah Kerjasama Siaran Nasional dan Internasional	1	
Total			170.700.641,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINS	KABUP ATEN / KOTA								
01	<i>Terlaksananya Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Program Siaran Berita, Hiburan, Pendidikan dan Budaya</i>										170.700.641,0
01.QAH	Pelayanan Publik Lainnya										170.700.641,0
01.QAH.001	Siaran TV Publik				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	• 000 - Buka n Tema tik	•	69.000.000,0
	051 - Layanan Siaran Berita										58.500.000,0
		Pusat	Pusat								58.500.000,0
	052 - Layanan Siaran Spesial										6.000.000,0
		Pusat	Pusat								6.000.000,0
	053 - Layanan Siaran Drama										2.000.000,0
		Pusat	Pusat								2.000.000,0
	054 - Layanan Siaran Akuisisi										2.500.000,0
		Pusat	Pusat								2.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINS I	KABUP ATEN / KOTA								
01.QAH.002	Layanan Pendukung Siaran Nasional								• 000 - Bukan Tematik	•	27.180.641,0
	051 - Penunjang Siaran Satker Promo										4.700.000,0
		Pusat	Pusat								4.700.000,0
	052 - Penunjang Siaran Satker Dokumentasi dan Kepustakaan										1.750.000,0
		Pusat	Pusat								1.750.000,0
	053 - Penunjang Siaran Satker Kreatifitas dan Pemandu Bakat										1.750.000,0
		Pusat	Pusat								1.750.000,0
	054 - Penunjang Siaran Satker Programing										2.400.000,0
		Pusat	Pusat								2.400.000,0
	055 - Penunjang Operasional Siaran										5.680.641,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)	
		PROVINS I	KABUP ATEN / KOTA									
		Pusat	Pusat								5.680.641,0	
	056 - Penunjang Siaran Satker Kerjasama Produksi Siaran Luar Negeri										3.100.000,0	
		Pusat	Pusat								3.100.000,0	
	057 - Layanan Kerjasama Pihak Asing										5.800.000,0	
		Pusat	Pusat								5.800.000,0	
	058 - Siaran Satker Kerjasama Produksi Siaran Luar Negeri										1.000.000,0	
		Pusat	Pusat								1.000.000,0	
	059 - Kanal TVRI World										1.000.000,0	
		Pusat	Pusat								1.000.000,0	
01.QAH.003	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpide, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Prestasi Olahraga	Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpide dan Potensi Daerah	• 000 - Bukaan Tematik	•		51.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)	
		PROVINS I	KABUP ATEN / KOTA									
	051 - Olimpiade Tokyo										26.000.000,0	
		Pusat	Pusat								26.000.000,0	
	052 - Paralimpiade Tokyo										4.000.000,0	
		Pusat	Pusat								4.000.000,0	
	053 - Sea Games 2021										11.000.000,0	
		Pusat	Pusat								11.000.000,0	
	054 - ASEAN Para Games										1.000.000,0	
		Pusat	Pusat								1.000.000,0	
	055 - PON Papua 2021										7.000.000,0	
		Pusat	Pusat								7.000.000,0	
	056 - Peparas 2021										2.000.000,0	
		Pusat	Pusat								2.000.000,0	
01.QAH.004	Kanal Pendidikan dan Budaya				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	• 000 - Bukaan Tematik	•		17.520.000,0
	051 - Kanal Pendidikan dan Budaya										5.000.000,0	
		Pusat	Pusat								5.000.000,0	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINS I	KABUP ATEN / KOTA								
	052 - Layanan Siaran Hiburan										6.520.000,0
		Pusat	Pusat								6.520.000,0
	053 - Layanan Siaran Musik										6.000.000,0
		Pusat	Pusat								6.000.000,0
01.QAH.005	Program Siaran Pendidikan dan Agama				Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat	• 000 - Buka n Tema tik	•	6.000.000,0
	051 - Layanan Siaran Pendidikan dan Agama										6.000.000,0
		Pusat	Pusat								6.000.000,0
Total											170.700.641,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Program Siaran Berita, Hiburan, Pendidikan dan Budaya				170.700.641,0				0,0	0,0	0,0
01.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan		170.700.641,0				0,0	0,0	0,0
01.QAH.001	Siaran TV Publik	1	layanan		69.000.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.QAH.001.051	Layanan Siaran Berita	3.880,0	Jam Siar	15.077,3	58.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.001.052	Layanan Siaran Spesial	36,0	Jam Siar	166.666,7	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.001.053	Layanan Siaran Drama	52,0	Jam Siar	38.461,5	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.001.054	Layanan Siaran Akuisisi	600,0	Jam Siar	4.166,7	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002	Layanan Pendukung Siaran Nasional	1	layanan		27.180.641,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.051	Penunjang Siaran Satker Promo	1,0	Layanan	4.700.000,0	4.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.052	Penunjang Siaran Satker Dokumentasi dan Kepustakaan	1,0	Layanan	1.750.000,0	1.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.053	Penunjang Siaran Satker Kreatifitas dan Pemandu Bakat	1,0	Layanan	1.750.000,0	1.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.054	Penunjang Siaran Satker Progaming	1,0	Layanan	2.400.000,0	2.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.055	Penunjang Operasional Siaran	1,0	Layanan	5.680.641,0	5.680.641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.056	Penunjang Siaran Satker Kerjasama Produksi Siaran Luar Negeri	1,0	Layanan	3.100.000,0	3.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.057	Layanan Kerjasama Pihak Asing	1,0	Layanan	5.800.000,0	5.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.058	Siaran Satker Kerjasama Produksi Siaran Luar Negeri	730,0	Jam Siar	1.369,9	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.002.059	Kanal TVRI World	0,0	Jam Siar	Infinity	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.QAH.003	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpiade, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas	1	layanan		51.000.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.QAH.003.051	Olimpiade Tokyo	0,0	Jam Siar	Infinity	26.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.003.052	Paralimpiade Tokyo	50,0	Jam Siar	80.000,0	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.003.053	Sea Games 2021	100,0	Jam Siar	110.000,0	11.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.003.054	ASEAN Para Games	30,0	Jam Siar	33.333,3	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.003.055	PON Papua 2021	100,0	Jam Siar	70.000,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.003.056	Peparnas 2021	20,0	Jam Siar	100.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.004	Kanal Pendidikan dan Budaya	1	layanan		17.520.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.QAH.004.051	Kanal Pendidikan dan Budaya	526,0	Jam Siar	9.505,7	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.004.052	Layanan Siaran Hiburan	876,0	Jam Siar	7.442,9	6.520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.004.053	Layanan Siaran Musik	788,0	Jam Siar	7.614,2	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QAH.005	Program Siaran Pendidikan dan Agama	1	layanan		6.000.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.QAH.005.051	Layanan Siaran Pendidikan dan Agama	1.400,0	Jam Siar	4.285,7	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					170.700.641,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Program Siaran Berita, Hiburan, Pendidikan dan Budaya		142.620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.080.641,0	0,0	0,0	0,0	170.700.641,0
01.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		142.620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.080.641,0	0,0	0,0	0,0	170.700.641,0
01.QAH.001	Siaran TV Publik		67.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	69.000.000,0
01.QAH.001.051	Layanan Siaran Berita	Utama	56.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	58.500.000,0
01.QAH.001.052	Layanan Siaran Spesial	Utama	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0
01.QAH.001.053	Layanan Siaran Drama	Utama	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.QAH.001.054	Layanan Siaran Akuisisi	Utama	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500.000,0
01.QAH.002	Layanan Pendukung Siaran Nasional		14.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.080.641,0	0,0	0,0	0,0	27.180.641,0
01.QAH.002.051	Penunjang Siaran Satker Promo	Utama	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	4.700.000,0
01.QAH.002.052	Penunjang Siaran Satker Dokumentasi dan Kepustakaan	Utama	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050.000,0	0,0	0,0	0,0	1.750.000,0
01.QAH.002.053	Penunjang Siaran Satker Kreatifitas dan Pemandu Bakat	Utama	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050.000,0	0,0	0,0	0,0	1.750.000,0
01.QAH.002.054	Penunjang Siaran Satker Programing	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0	0,0	0,0	0,0	2.400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.QAH.002.055	Penunjang Operasional Siaran	Utama	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.680.641,0	0,0	0,0	0,0	5.680.641,0
01.QAH.002.056	Penunjang Siaran Satker Kerjasama Produksi Siaran Luar Negeri	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0	0,0	0,0	0,0	3.100.000,0
01.QAH.002.057	Layanan Kerjasama Pihak Asing	Utama	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000,0	0,0	0,0	0,0	5.800.000,0
01.QAH.002.058	Siaran Satker Kerjasama Produksi Siaran Luar Negeri	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.QAH.002.059	Kanal TVRI World	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.QAH.003	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpiade, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas		40.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000.000,0	0,0	0,0	0,0	51.000.000,0
01.QAH.003.051	Olimpiade Tokyo	Utama	26.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.000.000,0
01.QAH.003.052	Paralimpiade Tokyo	Utama	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0
01.QAH.003.053	Sea Games 2021	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000.000,0	0,0	0,0	0,0	11.000.000,0
01.QAH.003.054	ASEAN Para Games	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.QAH.003.055	PON Papua 2021	Utama	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0
01.QAH.003.056	Peparnas 2021	Utama	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.QAH.004	Kanal Pendidikan dan Budaya		15.520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	17.520.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.QAH.004.051	Kanal Pendidikan dan Budaya	Utama	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.QAH.004.052	Layanan Hiburan Siaran	Utama	5.520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	6.520.000,0
01.QAH.004.053	Layanan Musik Siaran	Utama	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0
01.QAH.005	Program Pendidikan dan Agama Siaran		6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0
01.QAH.005.051	Layanan Pendidikan dan Agama Siaran	Utama	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0
Total			142.620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.080.641,0	0,0	0,0	0,0	170.700.641,0

LAMPIRAN 5
**FORMULIR 3 :KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
 TAHUN ANGGARAN 2021**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. PROGRAM : GC - Program Penyiaran Publik
3. SASARAN PROGRAM :
 • 01 - Meningkatnya Kualitas Program dan Berita
 • 02 - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran
4. KEGIATAN : 5154 - Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pengembangan Usaha
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Terlaksananya Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran		8.473.355
01.01	Jumlah Materi Publikasi dan Promosi Kegiatan On Air	1	
01.02	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Marketing	1	
01.03	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Potensial	1	
01.04	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha	1	
Total			8.473.355

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA CITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terlaksananya Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran</i>										8.473.355
01.AEC	Kerja sama										8.473.355
01.AEC.001	Kerjasama Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha								• 000 - Bukan Tematik	•	1.850.000
	051 - Pemasaran dan Peningkatan Kemitraan Bidang Jasa Siaran										1.149.258
		Pusat	Pusat								1.149.258
	052 - Layanan Publik Secara Langsung Bidang Jasa Siaran										700.742
		Pusat	Pusat								700.742
01.AEC.002	Kerjasama Penjualan Pemasaran Teknik dan Non Teknik (Non Siaran)								• 000 - Bukan Tematik	•	2.319.701
	051 - Pemasaran dan Peningkatan Kemitraan Bidang Jasa Teknik dan Non Teknik										489.916

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA CITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								489.916
	052 - Layanan Publik Secara Langsung Bidang Jasa Teknik dan Non Teknik										1.829.785
		Pusat	Pusat								1.829.785
01.AEC.003	Kerjasama Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi								• 000 - Bukan Tematik •	•	3.246.671
	051 - Pemasaran dan peningkatan kemitraan Bidang Strategi Pengembangan Usaha										652.145
		Pusat	Pusat								652.145
	052 - Promosi dan publikasi										937.177
		Pusat	Pusat								937.177
	053 - Diversifikasi pengembangan dan usaha Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi										61.522
		Pusat	Pusat								61.522
	054 - Layanan Penerimaan										1.595.827

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA CITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJII PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	Negara Bukan Pajak										
		Pusat	Pusat								1.595.827
01.AEC.004	Kerjasama Optimalisasi Aset								• 000 - Bukan Tematik	•	1.056.984
	051 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga atau Instansi terkait										257.836
		Pusat	Pusat								257.836
	052 - Optimalisasi Aset										696.008
		Pusat	Pusat								696.008
	053 - Laporan Tahunan										103.140
		Pusat	Pusat								103.140
Total											8.473.355

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Terlaksananya Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran				8.473.355				0,0	0,0	0,0
01.AEC	Kerja sama	4	Kesepakatan		8.473.355				0,0	0,0	0,0
01.AEC.001	Kerjasama Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha	1	Kesepakatan		1.850.000	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEC.001.051	Pemasaran dan Peningkatan Kemitraan Bidang Jasa Siaran	1,0	Kesepakatan	1.149.258	1.149.258	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.001.052	Layanan Publik Secara Langsung Bidang Jasa Siaran	1,0	Kesepakatan	700.742	700.742	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002	Kerjasama Penjualan Pemasaran Teknik dan Non Teknik (Non Siaran)	1	Kesepakatan		2.319.701	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002.051	Pemasaran dan Peningkatan Kemitraan Bidang Jasa Teknik dan Non Teknik	1,0	Kesepakatan	489.916	489.916	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.002.052	Layanan Publik Secara Langsung Bidang Jasa Teknik dan Non Teknik	1,0	Kesepakatan	1.829.785	1.829.785	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.003	Kerjasama Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi	1	Kesepakatan		3.246.671	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEC.003.051	Pemasaran dan peningkatan kemitraan Bidang Strategi Pengembangan Usaha	1,0	Layanan	652.145	652.145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.003.052	Promosi dan publikasi	1,0	Layanan	937.177	937.177	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.003.053	Diversifikasi pengembangan dan usaha Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi	1,0	Layanan	61.522	61.522	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.AEC.003.054	Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,0	Layanan	1.056.984	1.056.984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.004	Kerjasama Optimalisasi Aset	1	Kesepakatan		862.203,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEC.004.051	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga atau Instansi terkait	1,0	Layanan	257.836	257.836	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.004.052	Optimalisasi Aset	1,0	Layanan	696.008	696.008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.004.053	Laporan Tahunan	1,0	Layanan	103.140	103.140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					8.473.355	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran		5.223.356	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.250.000	0,0	0,0	0,0	8.473.356
01.AEC	Kerja sama		5.223.356	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.250.000	0,0	0,0	0,0	8.473.356
01.AEC.001	Kerjasama Penjualan Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha		1.200.927	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649.073	0,0	0,0	0,0	1.850.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.AEC.001.051	Pemasaran dan Peningkatan Kemitraan Bidang Jasa Siaran	Utama	671.073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478.185	0,0	0,0	0,0	1.149.258
01.AEC.001.052	Layanan Publik Secara Langsung Bidang Jasa Siaran	Utama	529.854	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170.888	0,0	0,0	0,0	700.742
01.AEC.002	Kerjasama Penjualan Pemasaran Teknik dan Non Teknik (Non Siaran)		1.752.735	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566.966	0,0	0,0	0,0	2.319.701
01.AEC.002.051	Pemasran dan Peningkatan Kemitraan Bidang Jasa Teknik dan Non Teknik	Utama	90.600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399.316	0,0	0,0	0,0	489.916
01.AEC.002.052	Layanan Publik Secara Langsung Bidang Jasa Teknik dan Non Teknik	Utama	1.662.135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167.650	0,0	0,0	0,0	1.829.785
01.AEC.003	Kerjasama Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi		2.011.858	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234.813	0,0	0,0	0,0	3.246.671
01.AEC.003.051	Pemasaran dan peningkatan kemitraan Bidang Strategi Pengembangan Usaha	Utama	45.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607.145	0,0	0,0	0,0	652.145
01.AEC.003.052	Promosi dan publikasi	Utama	937.177	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	937.177
01.AEC.003.053	Diversifikasi pengembangan dan usaha Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi	Utama	61.522	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61.522
01.AEC.003.054	Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Utama	968.159	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627.668	0,0	0,0	0,0	1.595.827
01.AEC.004	Kerjasama Optimalisasi Aset		257.836	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799.148	0,0	0,0	0,0	1.056.984
01.AEC.004.051	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga atau Instansi terkait	Utama	257.836	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257.836
01.AEC.004.052	Optimalisasi Aset	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696.008	0,0	0,0	0,0	696.008

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.AEC.004.053	Laporan Tahunan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103.140	0,0	0,0	0,0	103.140
Total			5.223.355	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.250.000	0,0	0,0	0,0	8.473.355

LAMPIRAN 6
FORMULIR 3 :KEGIATAN KEUANGAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. **PROGRAM** : WA - Program Dukungan Manajemen
3. **SASARAN PROGRAM** :
• 01 - Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI
4. **KEGIATAN** : 5147 - Pengelolaan Keuangan LPP TVRI
5. **UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : Direktorat Keuangan
6. **SASARAN KEGIATAN**

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Data Keuangan dan Perkantoran yang Akuntabel, Transparan serta Berbasis Teknologi Informasi		233.341.394,0
01.01	Jumlah Laporan Keuangan Akuntabel	1	
Total			233.341.394,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUPA TEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya Layanan Data Keuangan dan Perkantoran yang Akuntabel, Transparan serta Berbasis Teknologi Informasi</i>										233.341.394,0
01.EAA	Layanan Perkantoran										218.213.400,0
01.EAA.0 01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan								• 000 Bukan Tematik	•	138.421.400,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										138.421.400,0
		Pusat	Pusat								138.421.400,0
01.EAA.0 02	Operasional dan Pemeliharaan Kantor								• 000 Bukan Tematik	•	79.792.000,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										79.792.000,0
		Pusat	Pusat								79.792.000,0
01.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal										13.817.087,0
01.EAB.0 02	Layanan Pengelolaan Anggaran								• 000 Bukan Tematik	•	3.256.316,0
	051 - Pengelolaan Perbendaharaan										983.883,0
		Pusat	Pusat								983.883,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUPA TEN KOTA /								
	052 - Pengelolaan PNB										1.451.919,0
		Pusat	Pusat								1.451.919,0
	053 - Tatalaksana Keuangan										820.514,0
		Pusat	Pusat								820.514,0
01.EAB.952	Layanan Perencanaan								• 000 Bukan Tematik	•	5.433.729,0
	051 Penyusunan Rencana Program										1.086.540,0
		Pusat	Pusat								1.086.540,0
	052 Penyusunan Anggaran										3.611.742,0
		Pusat	Pusat								3.611.742,0
	053 - Pengelolaan Utang Piutang										735.447,0
		Pusat	Pusat								735.447,0
01.EAB.955	Layanan Manajemen Keuangan								• 000 Bukan Tematik	•	5.127.042,0
	051 - Pengelolaan Pajak										2.127.112,0
		Pusat	Pusat								2.127.112,0
	052 Penyelenggaraan Manajemen										740.848,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUPA TEN / KOTA								
	Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah										
		Pusat	Pusat								740.848,0
	053 Penyusunan Laporan Keuangan										2.259.082,0
		Pusat	Pusat								2.259.082,0
01.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal										1.310.907,0
01.EAL.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								• 000 Bukan Tematik	•	1.310.907,0
	051 Penyusunan Kemajuan Realisasi, Pencapaian Kinerja dan Evaluasi Anggaran										1.310.907,0
		Pusat	Pusat								1.310.907,0
Total											233.341.394,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Meningkatnya Layanan Data Keuangan dan Perkantoran yang Akuntabel, Transparan serta Berbasis Teknologi Informasi				233.341.394,0				0,0	0,0	0,0
01.EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan		218.213.400,0				0,0	0,0	0,0
01.EAA.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	Layanan		138.421.400,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAA.001.001	Gaji dan Tunjangan	1,0	Layanan	138.421.400,0	138.421.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan		79.792.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	79.792.000,0	79.792.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan		13.817.087,0				0,0	0,0	0,0
01.EAB.002	Layanan Pengelolaan Anggaran	1	Layanan		3.256.316,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAB.002.051	Pengelolaan Perbendaharaan	1,0	Layanan	983.883,0	983.883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.002.052	Pengelolaan PNBPNP	1,0	Layanan	1.451.919,0	1.451.919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.002.053	Tatalaksana Keuangan	1,0	Layanan	820.514,0	820.514,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan		5.433.729,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAB.952.051	Penyusunan Rencana Program	1,0	Layanan	1.086.540,0	1.086.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.952.052	Penyusunan Anggaran	1,0	Layanan	3.611.742,0	3.611.742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.952.053	Pengelolaan Utang Piutang	1,0	Layanan	735.447,0	735.447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan		5.127.042,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAB.955.051	Pengelolaan Pajak	1,0	Layanan	2.127.112,0	2.127.112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.EAB.955.052	Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1,0	Layanan	740.848,0	740.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAB.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	1,0	Layanan	2.259.082,0	2.259.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan		1.310.907,0				0,0	0,0	0,0
01.EAL.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Laporan		1.310.907,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAL.953.051	Penyusunan Kemajuan Realisasi, Pencapaian Kinerja dan Evaluasi Anggaran	1,0	Laporan	1.310.907,0	1.310.907,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					233.341.394,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya Layanan Data Keuangan dan Perkantoran yang Akuntabel, Transparan serta Berbasis Teknologi Informasi		232.341.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	233.341.394,0
01.EAA	Layanan Perkantoran		218.213.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218.213.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.EAA.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		138.421.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138.421.400,0
01.EAA.001.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	138.421.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138.421.400,0
01.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		79.792.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.792.000,0
01.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	79.792.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.792.000,0
01.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		12.817.087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	13.817.087,0
01.EAB.002	Layanan Pengelolaan Anggaran		3.256.316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.256.316,0
01.EAB.002.051	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	983.883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	983.883,0
01.EAB.002.052	Pengelolaan PNBP	Utama	1.451.919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451.919,0
01.EAB.002.053	Tatalaksana Keuangan	Utama	820.514,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820.514,0
01.EAB.952	Layanan Perencanaan		5.433.729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.433.729,0
01.EAB.952.051	Penyusunan Rencana Program	Utama	1.086.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.086.540,0
01.EAB.952.052	Penyusunan Anggaran	Utama	3.611.742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.611.742,0
01.EAB.952.053	Pengelolaan Utang Piutang	Utama	735.447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	735.447,0
01.EAB.955	Layanan Manajemen Keuangan		4.127.042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.127.042,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.EAB.955.051	Pengelolaan Pajak	Utama	1.127.112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	2.127.112,0
01.EAB.955.052	Penyelenggaraan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Utama	740.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740.848,0
01.EAB.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	Utama	2.259.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.259.082,0
01.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		1.310.907,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310.907,0
01.EAL.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.310.907,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310.907,0
01.EAL.953.051	Penyusunan Kemajuan Realisasi, Pencapaian Kinerja dan Evaluasi Anggaran	Utama	1.310.907,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310.907,0
Total			232.341.394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	233.341.394,0

LAMPIRAN 7
FORMULIR 3 : KEGIATAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM :

- 01 - Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI

4. KEGIATAN : 5148 - Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Umum
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan SDM, Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Humas dan Kegiatan Umum yang Terukur, Akuntabel, Tansparan dan dapat dipertanggung jawabkan		90.275.752,0
01.01	Jumlah Laporan Pengelolaan Bidang Umum	1	
Total			90.275.752,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Layanan SDM, Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Humas dan Kegiatan Umum yang Terukur, Akuntabel,										90.275.752,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA ITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUP ATEN / KOTA								
	<i>Tansparan dan dapat dipertanggung jawabkan</i>										
01.EAA	Layanan Perkantoran										36.319.558,0
01.EAA.00 2	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran								• 000 Bukan Tematik	•	36.319.558,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										36.319.558,0
		Pusat	Pusat								36.319.558,0
01.EAC	Layanan Umum										2.733.334,0
01.EAC.00 1	Manajemen Barang Milik Negara								• 000 Bukan Tematik	•	2.422.850,0
	051 - Penatausahaan BMN										1.655.534,0
		Pusat	Pusat								1.655.534,0
	052 - Penilaian BMN										136.320,0
		Pusat	Pusat								136.320,0
	054 - Penghapusan BMN										51.120,0
		Pusat	Pusat								51.120,0
	055 - Monitoring BMN										579.876,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA ITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUP ATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								579.876.0
01.EAC.00 2	Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga								• 000 - Bukan Tematik	•	310.484.0
	051 - Dukungan Manajemen Satker Digital										310.484.0
		Pusat	Pusat								310.484.0
01.EAD	Layanan Sarana Internal										12.262.160.0
01.EAD.05 3	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran								• 000 - Bukan Tematik	•	12.262.160.0
	200 - Peralatan dan Mesin										12.262.160.0
		Pusat	Pusat								12.262.160.0
01.EAE	Layanan Prasarana Internal										28.507.142.0
01.EAE.05 4	Pembangunan/Renova si Gedung dan Bangunan								• 000 - Bukan Tematik	•	28.507.142.0
	300 - Gedung dan Bangunan										28.507.142.0
		Pusat	Pusat								28.507.142.0
01.EAF	Layanan SDM										5.213.376.0
01.EAF.00 1	Manajemen Sumber Daya Manusia								• 000 - Bukan Tematik	•	5.213.376.0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWAC ITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUP ATEN / KOTA								
	051 - Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai										2.228.000.0
		Pusat	Pusat								2.228.000.0
	052 - Administrasi Kepegawaian										855.088.0
		Pusat	Pusat								855.088.0
	053 - Pembinaan Kepegawaian										300.500.0
		Pusat	Pusat								300.500.0
	054 - Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai										1.829.788.0
		Pusat	Pusat								1.829.788.0
01.EAG	Layanan Hukum										987.888,0
01.EAG.00 1	Koordinasi penyusunan Produk Hukum								• 000 Bukan Tematik	•	135.598.0
	051 - Penyusunan Perumusan Produk Hukum										135.598.0
		Pusat	Pusat								135.598.0
01.EAG.00 2	Bantuan Hukum								• 000 Bukan Tematik	•	852.290.0
	052 - Bantuan Hukum										852.290.0
		Pusat	Pusat								852.290.0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWA ITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVIN SI	KABUP ATEN / KOTA								
01.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler										4.252.294,0
01.EAI.001	Hubungan Masyarakat dan Informasi								• 000 - Bukan Tematik	•	1.777.591.0
	051 - Pengembangan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat										1.777.591.0
		Pusat	Pusat								1.777.591.0
01.EAI.002	Layanan Protokoler								• 000 - Bukan Tematik	•	2.474.703.0
	051 - Koordinasi Kebijakan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI										1.965.946.0
		Pusat	Pusat								1.965.946.0
	052 - Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi										508.754.0
		Pusat	Pusat								508.754.0
Total											90.275.752,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Layanan SDM, Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Humas dan Kegiatan Umum yang Terukur, Akuntabel, Tansparan dan dapat dipertanggung jawabkan				90.275.752,0				0,0	0,0	0,0
01.EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan		36.319.558,0				0,0	0,0	0,0
01.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1	Layanan		36.319.558,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	36.319.558,0	36.319.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAC	Layanan Umum	2	Layanan		2.733.334,0				0,0	0,0	0,0
01.EAC.001	Manajemen Barang Milik Negara	1	Layanan		2.422.850,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAC.001.051	Penatausahaan BMN	1,0	Layanan	1.655.534,0	1.655.534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAC.001.052	Penilaian BMN	1,0	Layanan	136.320,0	136.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAC.001.054	Penghapusan BMN	1,0	Layanan	51.120,0	51.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAC.001.055	Monitoring BMN	1,0	Layanan	579.876,0	579.876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAC.002	Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga	1	Layanan		310.484,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAC.002.051	Dukungan Manajemen Satker Digital	1,0	Layanan	310.484,0	310.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAD	Layanan Sarana Internal	481	unit		12.262.160,0				0,0	0,0	0,0
01.EAD.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	481	unit		12.262.160,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAD.053.200	Peralatan dan Mesin	481	Unit	25.493,0	12.262.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAE	Layanan Prasarana Internal	22	unit		28.507.142,0				0,0	0,0	0,0
01.EAE.054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	22	unit		28.507.142,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAE.054.300	Gedung dan Bangunan	22	Unit	1.295.779,2	28.507.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAF	Layanan SDM	1	orang		5.213.376,0				0,0	0,0	0,0
01.EAF.001	Manajemen Sumber Daya Manusia	1	orang		5.213.376,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAF.001.051	Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai	1,0	Orang	2.228.000,0	2.228.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.EAF.001.052	Administrasi Kepegawaian	1,0	Orang	855.088.0	855.088.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAF.001.053	Pembinaan Kepegawaian	1,0	Orang	300.500.0	300.500.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAF.001.054	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,0	Orang	1.829.788.0	1.829.788.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAG	Layanan Hukum	2	Layanan		987.888,0				0,0	0,0	0,0
01.EAG.001	Koordinasi penyusunan Produk Hukum	1	Layanan		135.598.0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAG.001.051	Penyusunan Perumusan Produk Hukum	1,0	Layanan	135.598.0	135.598.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAG.002	Bantuan Hukum	1	Layanan		852.290.0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAG.002.052	Bantuan Hukum	1,0	Layanan	852.290.0	852.290.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan		4.252.294,0				0,0	0,0	0,0
01.EAI.001	Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		1.777.591.0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAI.001.051	Pengembangan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat	1,0	Layanan	1.777.591.0	1.777.591.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAI.002	Layanan Protokoler	1	Layanan		2.474.703.0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAI.002.051	Koordinasi Kebijakan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI	1,0	Layanan	1.965.946.0	1.965.946.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAI.002.052	Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi	1,0	Layanan	508.754.0	508.754.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					90.275.752,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Layanan SDM, Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Humas dan Kegiatan Umum yang Terukur, Akuntabel, Tansparan dan dapat dipertanggung jawabkan		75.093.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.181.904,0	0,0	0,0	0,0	90.275.752,0
01.EAA	Layanan Perkantoran		36.319.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.319.558,0
01.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		36.319.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.319.558,0
01.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	36.319.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.319.558,0
01.EAC	Layanan Umum		2.733.334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.733.334,0
01.EAC.001	Manajemen Barang Milik Negara		2.422.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.422.850,0
01.EAC.001.051	Penatausahaan BMN	Utama	1.655.534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.655.534,0
01.EAC.001.052	Penilaian BMN	Utama	51.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.120,0
01.EAC.001.054	Penghapusan BMN	Utama	444.015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444.015,0
01.EAC.001.055	Monitoring BMN	Utama	579.876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579.876,0
01.EAC.002	Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga		310.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.484,0
01.EAC.002.051	Dukungan Manajemen Satker Digital	Utama	310.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.484,0
01.EAD	Layanan Sarana Internal		7.080.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.181.904,0	0,0	0,0	0,0	12.262.160,0
01.EAD.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		7.080.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.181.904,0	0,0	0,0	0,0	12.262.160,0
01.EAD.053.200	Peralatan dan Mesin	Utama	7.080.256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.181.904,0	0,0	0,0	0,0	12.262.160,0
01.EAE	Layanan Prasarana Internal		18.507.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	28.507.142,0
01.EAE.054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		18.507.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	28.507.142,0
01.EAE.054.300	Gedung dan Bangunan	Utama	18.507.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	28.507.142,0
01.EAF	Layanan SDM		5.213.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.213.376,0
01.EAF.001	Manajemen Sumber Daya Manusia		5.213.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.213.376,0
01.EAF.001.051	Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai	Utama	2.228.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.228.000,0
01.EAF.001.052	Administrasi Kepegawaian	Utama	855.088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	855.088,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.EAF.001.053	Pembinaan Kepegawaian	Utama	300.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.500,0
01.EAF.001.054	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Utama	1.829.788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.829.788,0
01.EAG	Layanan Hukum		987.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987.888,0
01.EAG.001	Koordinasi penyusunan Produk Hukum		135.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135.598,0
01.EAG.001.051	Penyusunan Perumusan Produk Hukum	Utama	135.598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135.598,0
01.EAG.002	Bantuan Hukum		852.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	852.290,0
01.EAG.002.052	Bantuan Hukum	Utama	852.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	852.290,0
01.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler		4.252.294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.252.294,0
01.EAI.001	Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.777.591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.777.591,0
01.EAI.001.051	Pengembangan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat	Utama	1.777.591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.777.591,0
01.EAI.002	Layanan Protokoler		2.474.703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.474.703,0
01.EAI.002.051	Koordinasi Kebijakan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI	Utama	1.965.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.965.946,0
01.EAI.002.052	Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi	Utama	508.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508.754,0
Total			75.093.848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.181.904,0	0,0	0,0	0,0	90.275.752,0

LAMPIRAN 8
FORMULIR 3 :KEGIATAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM :
 - 01 - Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI**4. KEGIATAN** : 5149 - Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Satuan Pengawasan Intern
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Pelaksanaan Audit Internal LPP TVRI sehingga Kualitas dan Kinerja LPP TVRI Pusat dan Daerah Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Dapat Dipertanggung Jawabkan		3.783.680
01.01	Pelaksanaan Audit Seluruh Satker TVRI	1	
Total			3.783.680

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Pelaksanaan Audit Internal LPP TVRI sehingga Kualitas dan Kinerja LPP TVRI Pusat dan Daerah Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Dapat Dipertanggung Jawabkan</i>										3.783.680

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACI TA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EAK	Layanan Pengawasan Internal										3.783.680
01.EAK.001	Supervisi dan Koordinasi Satuan Pengawas Intern								• 000 - Bukan Tematik	•	167.788
	051 - Supervisi dan Koordinasi										167.788
		Pusat	Pusat								167.788
01.EAK.002	Pengawasan Keuangan								• 000 - Bukan Tematik	•	1.251.774
	051 - Pelaksanaan Audit										782.412
		Pusat	Pusat								782.412
	054 - Tindak Lanjut Hasil LHP										263.906
		Pusat	Pusat								263.906
	055 - Reviu Perencanaan Penganggaran										205.456
		Pusat	Pusat								205.456
01.EAK.004	Pengawasan Umum dan SDM								• 000 - Bukan Tematik	•	1.515.874
	051 - Kapabilitas APIP										363.152
		Pusat	Pusat								363.152

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Audit										632.502
		Pusat	Pusat								632.502
	054 - Tindak Lanjut Hasil LHP										130.568
		Pusat	Pusat								130.568
	055 - Reviu Perencanaan Penganggaran										59.098
		Pusat	Pusat								59.098
	056 - Peningkatan Kualitas SDM										330.554
		Pusat	Pusat								330.554
01.EAK.053	Pengawasan Operasional								• 000 - Bukan Tematik	•	848.244
	051 - Pelaksanaan Audit										696.752
		Pusat	Pusat								696.752
	054 - Tindak Lanjut Hasil LHP										130.568
		Pusat	Pusat								130.568
	055 - Reviu Perencanaan Penganggaran										20.924

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								20.924
Total											3.783.680

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Pelaksanaan Audit Internal LPP TVRI sehingga Kualitas dan Kinerja LPP TVRI Pusat dan Daerah Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Dapat Dipertanggung Jawabkan				3.783.680				0,0	0,0	0,0
01.EAK	Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan		3.783.680				0,0	0,0	0,0
01.EAK.001	Supervisi dan Koordinasi Satuan Pengawas Intern	1	Laporan		167.788	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAK.001.051	Supervisi dan Koordinasi	1,0	Laporan	167.788	167.788	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.002	Pengawasan Keuangan	1	Laporan	1.251.774	1.251.774	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAK.002.051	Pelaksanaan Audit	1,0	Laporan	782.412	782.412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.002.054	Tindak Lanjut Hasil LHP	1,0	Laporan	263.906	263.906	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.002.055	Reviu Perencanaan Penganggaran	1,0	Laporan	205.456	205.456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.004	Pengawasan Umum dan SDM	1	Laporan		1.515.874	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAK.004.051	Kapabilitas APIP	1,0	Laporan	363.152	363.152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.004.052	Pelaksanaan Audit	1,0	Laporan	632.502	632.502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01.EAK.004.054	Tindak Lanjut Hasil LHP	1,0	Laporan	130.568	130.568	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.004.055	Reviu Perencanaan Penganggaran	1,0	Laporan	59.098	59.098	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.004.056	Peningkatan Kualitas SDM	1,0	Laporan	330.554	330.554	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.053	Pengawasan Operasional	1	Laporan		848.244	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAK.053.051	Pelaksanaan Audit	1,0	Laporan	696.752	696.752	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.053.054	Tindak Lanjut Hasil LHP	1,0	Laporan	130.568	130.568	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAK.053.055	Reviu Perencanaan Penganggaran	1,0	Laporan	20.924	20.924	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					3.783.680	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Pelaksanaan Audit Internal LPP TVRI sehingga Kualitas dan Kinerja LPP TVRI Pusat dan Daerah Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Dapat Dipertanggung Jawabkan		3.783.680	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.783.680
01.EAK	Layanan Pengawasan Internal		3.783.680	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.783.680
01.EAK.001	Supervisi dan Koordinasi Satuan Pengawas Intern		167.788	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167.788
01.EAK.001.051	Supervisi dan Koordinasi	Utama	167.788	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167.788

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.EAK.002	Pengawasan Keuangan		1.251.774	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.251.774
01.EAK.002.051	Pelaksanaan Audit	Utama	782.412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	782.412
01.EAK.002.054	Tindak Lanjut Hasil LHP	Utama	263.906	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263.906
01.EAK.002.055	Reviu Perencanaan Penganggaran	Utama	205.456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205.456
01.EAK.004	Pengawasan Umum dan SDM		1.515.874	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.515.874
01.EAK.004.051	Kapabilitas APIP	Utama	363.152	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363.152
01.EAK.004.052	Pelaksanaan Audit	Utama	632.502	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632.502
01.EAK.004.054	Tindak Lanjut Hasil LHP	Utama	130.568	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.568
01.EAK.004.055	Reviu Perencanaan Penganggaran	Utama	59.098	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.098
01.EAK.004.056	Peningkatan Kualitas SDM	Utama	330.554	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330.554
01.EAK.053	Pengawasan Operasional		848.244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	848.244
01.EAK.053.051	Pelaksanaan Audit	Utama	696.752	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696.752
01.EAK.053.054	Tindak Lanjut Hasil LHP	Utama	130.568	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.568
01.EAK.053.055	Reviu Perencanaan Penganggaran	Utama	20.924	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.924
Total			3.783.680	0,0	3.783.680								

LAMPIRAN 9
FORMULIR 3 : KEGIATAN PUSDIKLAT
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM :

- 01 - Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI

4. KEGIATAN : 5150 - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Pendidikan Dan Pelatihan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Pelaksanaan Diklat yang mampu meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Peserta Diklat Internal dan Eksternal (Umum)		9.214.722
01.01	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diklat	1	
02	Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Hubungan Internasional dalam Ilmu Pendidikan		0,0
02.02	Jumlah Laporan Pengembangan dan Peningkatan	1	
Total			9.214.722

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABU PATEN / KOTA								
01	<i>Pelaksanaan Diklat yang mampu meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Peserta Diklat Internal dan Eksternal (Umum)</i>										9.214.722
01.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal										5.792.489

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABU PATEN / KOTA								
01.EAH.001	Layanan Fasilitas dan Sarana Pendidikan dan Pelatihan								• 000 - Bukan Tematik	•	5.106.804
	051 - Kegiatan Internal Operasional Peralatan										19.720
		Pusat	Pusat								19.720
	052 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan										19.720
		Pusat	Pusat								19.720
	053 - Kegiatan Administrasi dan Rumah Tangga										5.067.364
		Pusat	Pusat								5.067.364
01.EAH.002	Layanan Dukungan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan								• 000 - Bukan Tematik	•	685.685
	052 - Koordinasi dan Pengembangan Puskdiklat										685.685
		Pusat	Pusat								685.685
01.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal										3.422.233
01.EAM.002	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Puskdiklat								• 000 - Bukan Tematik	•	883.583
	051 - Kegiatan Internal Perencanaan Diklat										551.360

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABU PATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								551.360
	052 - Kegiatan Internal Evaluasi Diklat										332.223
		Pusat	Pusat								332.223
01.EAM.003	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								• 000 - Bukan Tematik	•	2.538.650
	051 - Kegiatan Internal Penyelenggaraan Diklat										1.985.425
		Pusat	Pusat								1.985.425
	052 - Kegiatan Internal Kerjasama Diklat										553.225
		Pusat	Pusat								553.225
Total											9.214.722,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Pelaksanaan Diklat yang mampu meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Peserta Diklat Internal dan Eksternal (Umum)				9.214.722,0				0,0	0,0	0,0
01.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan		5.792.489				0,0	0,0	0,0
01.EAH.001	Layanan Fasilitas dan Sarana Pendidikan dan Pelatihan	1	Layanan		5.106.804	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAH.001.051	Kegiatan Internal Operasional Peralatan	1,0	Layanan	19.720	19.720	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EAH.001.052	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	1,0	Layanan	19.720	19.720	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EAH.001.053	Kegiatan Administrasi dan Rumah Tangga	1,0	Layanan	5.067.364	5.067.364	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EAH.002	Layanan Dukungan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	1	Layanan		685.685	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAH.002.052	Koordinasi dan Pengembangan Pusdiklat	1,0	Layanan	685.685	685.685	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	643	Orang		3.422.233				0,0	0,0	0,0
01.EAM.002	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Pusdiklat	188	Orang		883.583	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAM.002.051	Kegiatan Internal Perencanaan Diklat	1,0	Orang	551.360	551.360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAM.002.052	Kegiatan Internal Evaluasi Diklat	1,0	Orang	332.223	332.223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAM.003	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	455	Orang		2.538.650	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAM.003.051	Kegiatan Internal Penyelenggaraan Diklat	1,0	Orang	1.985.425	1.985.425	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAM.003.052	Kegiatan Internal Kerjasama Diklat	1,0	Orang	553.225	553.225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					9.214.722,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Pelaksanaan Diklat yang mampu meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Peserta Diklat Internal dan Eksternal (Umum)		6.656.897	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.557.825	0,0	0,0	0,0	9.214.722,0
01.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		4.062.250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.730.329	0,0	0,0	0,0	4.686.919,0
01.EAH.001	Layanan Fasilitas dan Sarana Pendidikan dan Pelatihan		3.487.955	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.618.849	0,0	0,0	0,0	3.994.624,0
01.EAH.001.051	Kegiatan Internal Operasional Peralatan	Utama	19.720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265.360,0
01.EAH.001.052	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Utama	19.720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56.440,0
01.EAH.001.053	Kegiatan Administrasi dan Rumah Tangga	Utama	3.448.515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.618.849	0,0	0,0	0,0	3.672.824,0
01.EAH.002	Layanan Dukungan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan		574.295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111.390	0,0	0,0	0,0	692.295,0
01.EAH.002.052	Koordinasi dan Pengembangan Pusdiklat	Utama	574.295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111.390	0,0	0,0	0,0	692.295,0
01.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal		2.594.647	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827.586	0,0	0,0	0,0	4.527.803,0
01.EAM.002	Layanan Perencanaan dan Evaluasi Pusdiklat		865.553	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.030	0,0	0,0	0,0	813.707,0
01.EAM.002.051	Kegiatan Internal Perencanaan Diklat	Utama	551.360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408.134,0
01.EAM.002.052	Kegiatan Internal Evaluasi Diklat	Utama	314.193	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.030	0,0	0,0	0,0	405.573,0
01.EAM.003	Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		1.729.094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809.556	0,0	0,0	0,0	3.714.096,0
01.EAM.003.051	Kegiatan Internal Penyelenggaraan Diklat	Utama	1.336.790	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648.635	0,0	0,0	0,0	3.076.020,0
01.EAM.003.052	Kegiatan Internal Kerjasama Diklat	Utama	392.304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160.921	0,0	0,0	0,0	638.076,0
Total			6.656.897	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.557.825	0,0	0,0	0,0	9.214.722

LAMPIRAN 10
FORMULIR 3 :KEGIATAN PUSLITBANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM :
 - 01 - Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI**4. KEGIATAN** : 5151 - Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Penelitian Dan Pengembangan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Data Survey Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Penyiaran LPP TVRI yang Akurat dan Berkualitas		4.474.375
01.01	Jumlah Laporan hasil Penelitian	1	
02	Data Survey Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM LPP TVRI		0,0
02.02	Jumlah Laporan Pengembangan	1	
Total			4.474.375

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Data Survey Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Penyiaran LPP TVRI yang Akurat dan Berkualitas										4.474.375

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EAJ	Layanan Data dan Informasi										4.474.375
01.EAJ.001	Kajian Strategis Pengembangan TV Publik								• 000 - Bukan Tematik	•	
	051 - Kajian Strategis dalam Rangka Pengembangan TV Publik										
		Pusat	Pusat								
01.EAJ.002	Pengkajian Program dan Berita								• 000 - Bukan Tematik	•	2.575.000
	051 - Peningkatan jangkauan Survei audience dan Share diluar wilayah Nielsen										
		Pusat	Pusat								
	052 - Ketersediaan data kepemirsaaan rating Nielsen										1.915.000
		Pusat	Pusat								1.915.000
	053 - Pelaksanaan Survei Bidang Pengkajian										660.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	Program dan Berita										
		Pusat	Pusat								660.000
01.EAJ.005	Pengkajian Pengembangan Usaha								• 000 - Bukan Tematik	•	590.000
	051 Pelaksanaan Penelitian										590.000
		Pusat	Pusat								590.000
01.EAJ.053	Pengkajian Kelembagaan								• 000 - Bukan Tematik	•	748.375
	051 Pelaksanaan Penelitian										0
		Pusat	Pusat								0
	052 Pelaksanaan Pengkajian										748.375
		Pusat	Pusat								748.375
01.EAJ.054	Pengkajian Teknologi								• 000 - Bukan Tematik	•	561.000
	051 Pelaksanaan Pengkajian										561.000
		Pusat	Pusat								561.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
Total											4.474.375

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Data Survey Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Penyiaran LPP TVRI yang Akurat dan Berkualitas				4.474.375				0,0	0,0	0,0
01.EAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan		4.474.375				0,0	0,0	0,0
01.EAJ.001	Kajian Strategis Pengembangan TV Publik	1	Layanan		0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.001.051	Kajian Strategis dalam Rangka Pengembangan TV Publik	1,0	Layanan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.002	Pengkajian Program dan Berita	1	Layanan		2.575.000	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.002.051	Peningkatan jangkauan Survei audience dan Share diluar wilayah Nielsen	1,0	Layanan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.002.052	Ketersediaan data kepemirsaaan rating Nielsen	1,0	Layanan	1.915.000	1.915.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.002.053	Pelaksanaan Survei Bidang Pengkajian Program dan Berita	1,0	Layanan	660.000	660.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.005	Pengkajian Pengembangan Usaha	1	Layanan		590.000	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.005.051	Pelaksanaan Penelitian	1,0	Layanan	590.000	590.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.053	Pengkajian Kelembagaan	1	Layanan		748.375	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.053.051	Pelaksanaan Penelitian	1,0	Layanan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.053.052	Pelaksanaan Pengkajian	1,0	Layanan	748.375	748.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.054	Pengkajian Teknologi	1	Layanan		561.000	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EAJ.054.051	Pelaksanaan Pengkajian	1,0	Layanan	561.000	561.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					4.474.375	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Data Survey Terhadap Peningkatan Kualitas Produksi dan Penyiaran LPP TVRI yang Akurat dan Berkualitas		3.474.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000	0,0	0,0	0,0	4.474.375
01.EAJ	Layanan Data dan Informasi		3.474.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000	0,0	0,0	0,0	4.474.375
01.EAJ.001	Kajian Strategis Pengembangan TV Publik		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EAJ.001.051	Kajian Strategis dalam Rangka Pengembangan TV Publik	Utama	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EAJ.002	Pengkajian Program dan Berita		2.247.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328.000	0,0	0,0	0,0	2.575.000
01.EAJ.002.051	Peningkatan jangkauan Survei audience dan Share diluar wilayah Nielsen	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
01.EAJ.002.052	Ketersediaan data kepemirsaaan rating Nielsen	Utama	1.915.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.915.000
01.EAJ.002.053	Pelaksanaan Survei Bidang Pengkajian Program dan Berita	Utama	332.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328.000	0,0	0,0	0,0	660.000
01.EAJ.005	Pengkajian Pengembangan Usaha		400.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.000	0,0	0,0	0,0	590.000
01.EAJ.005.051	Pelaksanaan Penelitian	Utama	400.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190.000	0,0	0,0	0,0	590.000
01.EAJ.053	Pengkajian Kelembagaan		469.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279.000	0,0	0,0	0,0	748.375
01.EAJ.053.051	Pelaksanaan Penelitian	Utama	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
01.EAJ.053.052	Pelaksanaan Pengkajian	Utama	469.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279.000	0,0	0,0	0,0	748.375
01.EAJ.054	Pengkajian Teknologi		358.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203.000	0,0	0,0	0,0	561.000
01.EAJ.054.051	Pelaksanaan Pengkajian	Utama	358.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203.000	0,0	0,0	0,0	561.000
Total			3.474.375	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000	0,0	0,0	0,0	4.474.375